



"Konsultasikan Arah Masa Depan
Putra Putri Anda Pada Kami"

RINGKASAN MATERI TWK



Untuk info lebih lengkap
Kunjungi <https://nawapp.com/>



Uji Kemampuanmu di
Applikasi CAT nawapp



Ringkasan Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Tes Wawasan Kebangsaan diujikan pada Tes Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik menggunakan sistem CAT maupun PBT. Tes ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh peserta tes CPNS dalam pemahaman wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut dapat digunakan dalam dunia pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga nasional, maupun pemerintah daerah tingkat I dan II.

Ringkas 1: Pancasila

A. Arti dan Pengertian Ideologi

1. Arti kata ideologi

Ideologi berasal dari kata idea dan logos.

- Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan.
- Logos artinya pengetahuan.

2. Pengertian ideologi

- Secara sederhana Ideologi berarti pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan.
- Secara luas

Ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

B. Dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia

1. Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
2. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia





Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara.

3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai dan memberikan arah serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

C. Sejarah Perumusan Pancasila

Berikut adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI.

1. Muh. Yamin

Muh. Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, mengemukakan:

- (i) Peri kebangsaan.
- (ii) Peri keadilan.
- (iii) Peri ketuhanan.
- (iv) Peri kerakyatan.
- (v) Kesejahteraan rakyat.

2. Soepomo

Soepomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, mencetuskan:

- (i) Persatuan.
- (ii) Kekeluargaan.
- (iii) Keseimbangan lahir batin.
- (iv) Musyawarah.
- (v) Keadilan rakyat.

3. Ir. Soekarno

Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, mengusulkan:

- (i) Kebangsaan Indonesia.
- (ii) Internasionalisme atau perikemanusiaan.
- (iii) Mufakat atau demokrasi.
- (iv) Kesejahteraan sosial.
- (v) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Usulan rumusan Pancasila dari ketiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang disebut Panitia Sembilan. Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:

- (i) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- (ii) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (iii) Persatuan Indonesia.
- (iv) Kerakyatan yang dipimpin oleh



hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

- (v) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, sebelum pengesahan UUD 1945, kalimat sila pertama rumusan Pancasila telah diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

D. Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki nilai-nilai sebagai berikut.

1. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa

- a. Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

2. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia.
- b. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

3. Nilai-nilai persatuan Indonesia

- a. Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

4. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- a. Selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia.





E. Perbandingan Ideologi

Berikut adalah tabel perbandingan antara ideologi komunisme, liberalisme, dan Pancasila.

No	Komunisme	Liberalisme	Pancasila
1	HAM diabaikan	HAM dijunjung secara mutlak	HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi
2	Nasionalisme ditolak	Nasionalisme diabaikan	Nasionalisme dijunjung tinggi
3	Keputusan di tangan pimpinan partai	Keputusan melalui suara terbanyak (voting)	Keputusan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka diadakan pemungutan suara.
4	Dominasi partai	Dominasi mayoritas	Tidak ada dominasi
5	Tidak ada oposisi	Ada oposisi	Ada oposisi dengan alasan (sebagai penyeimbang)
6	Tidak ada perbedaan pendapat	Ada perbedaan pendapat	Ada perbedaan pendapat, dan dihargai
7	Kepentingan negara	Kepentingan mayoritas	Kepentingan seluruh rakyat

F. Sikap Positif terhadap Pancasila

Berikut adalah sikap positif terhadap Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik
 - a. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
 - b. Menjalankan pemerintahan secara jujur dan konsekuen.
2. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi
 - a. Memanfaatkan sumber daya alam secara baik.
 - b. Menjalankan kegiatan perekonomian secara jujur.
3. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan lokal
 - a. Menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa melihat asal usul, agama, ras, dan latar belakang kehidupannya.
 - b. Bersikap adil dan tidak mengambil hak orang lain.





Ringkas 2: Undang-Undang Dasar 1945

A. Hakikat Konstitusi

Pengertian Konstitusi

- Dalam arti sempit
Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara.
- Dalam arti luas
Konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antarlembaga negara dan antara negara dengan warga negara.

B. Macam-Macam Konstitusi

Macam-macam konstitusi sebagai berikut.

1. Konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar.
2. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi.

C. Sifat Konstitusi

Sifat konstitusi berdasarkan jumlah pasalnya sebagai berikut.

1. Fleksibel (luwes)

Artinya, pasal-pasal dalam konstitusi

jumlahnya sedikit sehingga mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Rigid (kaku)

Artinya, pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya banyak dan sulit diubah-ubah.

D. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

- UUD 1945 atau UUD Proklamasi, berlaku pada 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
- UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
- Pada saat ditetapkan, sistematika UUD 1945 terdiri dari:
 - a. Pembukaan
Ada empat alinea.
 - b. Batang tubuh
Terdiri dari:
 - ada 16 bab,
 - 37 pasal,
 - 4 ayat aturan peralihan, dan
 - 2 ayat aturan tambahan.
 - c. Penjelasan
Terdiri dari:





- penjelasan umum, dan
- penjelasan khusus (pasal demi pasal).
- Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945.
- Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945.
- Sistem pemerintahan adalah kabinet presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.

2. Konstitusi Republik Indonesia

Serikat (RIS) 1949

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 (UUD RIS 1949) berlaku pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
- Sistematis UUD RIS 1949 terdiri dari sebagai berikut.
 - a. Mukadimah
Terdiri dari empat alinea.
 - b. Batang tubuh
Terdiri dari:
 - 6 bab, dan
 - 197 pasal.
- Bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi.
- Bentuk pemerintah Indonesia

- adalah republik, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi RIS.
- Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer. Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

3. Undang-Undang Dasar

Sementara 1950 (UUDS 1950)

- UUDS 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
- Sistematis UUDS 1950 terdiri dari:
 - a. Mukadimah
Terdiri dari empat alinea.
 - b. Bab I : Negara Republik Indonesia
 - c. Bab II : Alat-alat kelengkapan negara
 - d. Bab III : Tugas alat-alat kelengkapan negara
 - e. Bab IV : Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja
 - f. Bab V : Konstituante
 - g. Bab VI : Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketentuan-ketentuan penutup
- Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUDS 1950.
- Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan





Pasal 1 Ayat (1) dan Mukadimah alinea IV UUDS 1950.

- Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.

Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet, sedangkan presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR.

4. UUD 1945 hasil Dekret Presiden

- UUD 1945 hasil Dekret Presiden disebut juga UUD 1945 periode kedua, berlaku pada 5 Juli 1959 – 2000.
- Gagalnya Badan Konstituante dalam menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar berdampak pada keadaan politik yang tidak stabil sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Salah satu isi dekret tersebut memberlakukan kembali UUD 1945.
- Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

5. UUD 1945 hasil amandemen

- UUD 1945 hasil amandemen berlaku dari tahun 2000 sampai sekarang.
- Sistematika UUD 1945 Amandemen terdiri dari:
 - a. Pembukaan
Ada empat alinea.
 - b. Batang tubuh
Terdiri dari:
 - 37 pasal, dan
 - 16 bab.
- Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain:
 - a. Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara Presiden dan DPR.
 - b. Masa jabatan presiden diatur dengan tegas, yaitu maksimal dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan.
 - c. Dilaksanakannya otonomi daerah.
 - d. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga nonpemerintahan yang netral dan mandiri.

E. Berbagai Penyimpangan terhadap Konstitusi

Berikut adalah berbagai penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia.





1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1945–1949

- Kekuasaan presiden tidak terbatas
Masa awal proklamasi dianggap sebagai masa peralihan sehingga pada masa ini, kekuasaan presiden sangat luas. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR.
- Di samping presiden, hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden.
- Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen/DPR.

2. Penyimpangan terhadap UUD RIS 1949

- Penyimpangan bentuk negara
Bentuk negara serikat bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pergantian UUD 1945 menjadi UUD RIS.
- Pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.

3. Penyimpangan terhadap UUDS 1950

- Persaingan tidak sehat
Dengan ditetapkannya demokrasi liberal, ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- Instabilitas nasional
Terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering bergantinya kabinet sehingga program-program yang disusun sebelumnya tidak berjalan.

4. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1959–1965 (Orde Lama)

- Presiden membubarkan DPR
Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN yang disusulkan pemerintah.
- Penetapan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita/Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS.
- Pengangkatan presiden seumur hidup
Pengangkatan presiden seumur hidup melalui Tap MPR No.III/MPRS/1963.



- Rangkap jabatan
Pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai menteri negara.
- Kekuasaan presiden tidak terbatas
Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam UUD 1945.
- Tidak berjalannya hak bujet DPR karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.

5. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1965 (Orde Baru)

Berikut adalah penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1965, yaitu pada masa orde baru sampai munculnya Gerakan Reformasi 1998.

- Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme.
- Pembatasan aspirasi
Kebebasan berbicara terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dibungkam.
- Ekonomi kerakyatan tidak berjalan
Ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalisme, monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga

- Supremasi hukum tidak berjalan
Supremasi hukum berubah menjadi supremasi kekuasaan presiden.
- Lembaga legislatif tidak berjalan
Lembaga legislatif tidak mewakili rakyat bahkan tidak inspiratif karena hasil rekayasa politik.
- Bermunculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

F. Amandemen UUD 1945

Amandemen adalah penambahan atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya.

1. Kesepakatan dasar dalam mengamandemen UUD 1945

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
- b. Tetap mempertahankan bentuk nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Tetap mempertahankan sistem presidensial.
- d. Penjelasan UUD 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- e. Perubahan dilakukan secara “addendum”.

2. Tujuan amandemen UUD 1945

- a. Memenuhi tuntutan-tun-





tutan reformasi.

- b. Untuk merevisi ulang UUD 1945.
- c. Agar isi UUD 1945 lebih jelas setelah diamandemen.

3. Perbaikan dan perubahan (amandemen UUD 1945) yang dimaksud adalah:

- a. Adanya pembatasan-pembatasan atas kekuasaan Presiden di Indonesia.
- b. Memperkuat dan menegaskan kembali peran kekuasaan legislatif di Indonesia.
- c. Mencantumkan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- d. Menegaskan kembali hak dan kewajiban negara ataupun warga negara.
- e. Otonomi daerah dan hak-hak rakyat di daerah.
- f. Perbaruan lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

4. Tahap-tahap amandemen UUD 1945

- a. Tahap pertama
 - Diputuskan dalam Sidang MPR pada 19 Oktober 1999.
 - Menyangkut 5

persoalan pokok:

- Perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang.
 - Perubahan masa jabatan presiden.
 - Perubahan tentang hak prerogatif presiden.
 - Perubahan tentang fungsi menteri.
 - Perubahan redaksional.
 - 9 pasal yang diamandemen adalah: Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.
- b. Tahap kedua
 - Diputuskan dalam Sidang MPR pada 18 Agustus 2000.
 - Menyangkut 9 persoalan pengaturan mengenai:
 - Wilayah negara.
 - Hak-hak asasi manusia.
 - DPR.
 - Pemerintahan Daerah.
 - Pertahanan dan keamanan.
 - Lambang negara.



- Lagu kebangsaan.
 - 5 bab dan 25 pasal yang diamandemen adalah:
 - Bab IXA, X, XI, XII, dan XV.
 - Pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30, 36B, 36C, dan 36A.
- c. Tahap ketiga
- Diputuskan dalam Sidang MPR pada 9 November 2001.
 - Berkenaan dengan 16 persoalan pokok, meliputi:
 - Kedaulatan rakyat.
 - Tugas MPR.
 - Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden.
 - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
 - Pemberhentian Presiden.
 - Presiden berhalangan tetap.
 - Kekosongan Wakil Presiden.
 - Perjanjian internasional.
- Kementerian negara.
 - Pemilihan umum.
 - APBN, pajak, dan keuangan negara.
 - Komisi Yudisial.
 - Mahkamah Konstitusi.
 - 3 bab dan 22 pasal yang diamandemen adalah:
 - Bab VIIA, VIIB, dan VIIIA.
 - Pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, dan 24C.
- d. Tahap keempat
- Diputuskan dalam Sidang MPR pada 10 Agustus 2002.
 - Berkenaan dengan 12 persoalan sebagai berikut.
 - Komposisi keanggotaan MPR.
 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan.
 - Dewan Pertimbangan

yang bertugas
memberi nasihat
Presiden.

- Mata uang.
- Bank sentral.
- Badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman.
- Pendidikan.
- Kebudayaan.
- 2 bab dan 13 pasal yang diamandemen adalah:
 - Bab XIII, dan XIV.
 - Pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37.

Rangkuman setelah 4 kali amandemen UUD 1945

- Sebanyak 25 butir tidak diubah,
- 46 butir diubah atau ditambah dengan ketentuan lainnya.
- Secara keseluruhan, saat ini berjumlah 199 butir ketentuan, 174 ketentuan baru.

Ringkas 3: Bhinneka Tunggal Ika

A. Sejarah Penemuan Bhinneka Tunggal Ika

- Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk pada abad XIV (1350–1389).
- Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya, kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa” yang artinya, “Berbeda-beda, tak ada pengabdian yang mendua”. Kutipan tersebut berasal dari pupuh 139, bait 5, kekawin Sutasoma.

Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap satu pengabdian.

Sasanti yang merupakan karya Mpu Tantular diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma, sedangkan oleh bangsa





Indonesia dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam membawa diri dalam hidup berbangsa dan bernegara.

B. Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika

- Pada 1951 semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 menyatakan bahwa:
Sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Kata bhinneka kemudian dirangkai menjadi satu kata bhinneka.
- Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara, dan tercantum dalam pasal 36A UUD 1945.

Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 (asli), namun esensinya terdapat di dalamnya.

Sebagai contoh:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan selu-

ruh rakyat Indonesia, terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

- Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan:

Di daerah yang bersifat otonom, akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *voksgemeenschappen*. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Makna dari contoh di atas adalah dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan perlu ditampung keanekaragaman atau kemajemukan bangsa dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Lambang Negara Indonesia

- Dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, Pasal 3 Ayat (3) menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah.
- Sebagai tindak lanjut dari





pasal tersebut, terbit Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

- Baru setelah diadakan amandemen UUD 1945, dalam pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, menyebutkan lambang negara terdiri atas tiga bagian, yaitu
 1. Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya.
 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda.
 3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita, tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika”.

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia.

D. Konsep Dasar Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam UUD-nya. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu dipahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya dipahami cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula.

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan bangsa Indonesia, perlu mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu. Berikut isi dalam Pembukaan UUD 1945:

1. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
2. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas.
3. Salah satu misi negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Salah satu dasar negara Indonesia adalah Persatuan Indonesia yang merupakan wawasan kebangsaan.





5. Ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari isi dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme.

E. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

- Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras.
- Beberapa cara menyikapi kemajemukan di antaranya adalah:
 - Kemajemukan dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh.
 - Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi kekuatan

yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa.

- Kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

F. Paham Bhinneka Tunggal Ika

Paham Bhinneka Tunggal Ika oleh Ir. Sujanto disebut sebagai paham Tantularisme, bukan paham sinkretisme. Paham Bhinneka Tunggal Ika dicoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur dari luar.

Contoh:

Adat istiadat tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan.

G. Prinsip-Prinsip yang Terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu:

1. Toleransi

Pembentukan kesatuan dari keanekaragaman (bukan pembentukan konsep baru dari keanekaragaman) pada unsur atau komponen bangsa.

Contoh:

terdapat keanekaragaman aga-



ma dan kepercayaan.

Artinya:

- Ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru.
- Setiap agama diakui seperti apa adanya, tetapi dicari common denominator dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Common denominator adalah prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan.

- *Common denominator* ini dipegang sebagai ketunggalan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

2. **Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, melainkan bersifat inklusif.**

- Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif

Artinya:

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain.

- ♦ Kelemahan pandangan sektarian dan eksklusif (tertutup):
 - Menghambat terjadinya perkembangan dalam meng-

hadapi arus globalisasi dan keanekaragaman budaya bangsa.

- Memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan.

Cirinya: tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat.

- ♦ Cara menyikapi pandangan sektarian dan eksklusif:

Perlu adanya sifat terbuka yang terarah agar memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara koeksistensi, memiliki sifat saling menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar, dan tidak memaksakan kehendak pribadi kepada pihak lain. Sehingga dapat berkembangnya menjadi masyarakat modern.

- Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif.

Artinya:

Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

Kelebihan:

Kelebihan dari Bhinneka Tunggal Ika yang bersifat in-



klusif ada pada segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah dibuat agar mampu

- Mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
- Menghindari hal-hal yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa.

3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu.

Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai, dan rukun. Hanya dengan cara demikian, keanekaragaman ini dapat dipersatukan.

4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen (tidak divergen).

Hal ini bermakna bahwa perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut akan terwujud jika dilandasi oleh sikap toleran

nonsektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

5. Terbuka

6. Koeksistensi damai dan kebersamaan

7. Kesetaraan

8. Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, secara konsistensi akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, dan teratur sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

H. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan bahwa:

“Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Awalnya, kemerdekaan atau kebebasan diberi makna bebas dari penjajahan negara asing, namun saat ini memiliki makna yang lebih luas yaitu menyangkut harkat dan martabat manusia serta hak asasi





manusia, karena di era globalisasi berkembang neoliberalisme dan neokapitalisme. Paham neoliberalisme dan neokapitalisme menyebabkan penjajahan dalam bentuk baru, yaitu penjajahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang kehidupan yang lain. Dengan begitu, kemerdekaan dimaknai sebagai bebas dari berbagai eksploitasi manusia oleh manusia dalam segala dimensi kehidupan, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Manusia memiliki kebebasan dalam berpikir, berkehendak, memilih, dan bebas dari segala macam ketakutan yang merupakan aktualisasi dari konsep hak asasi manusia, yaitu menundukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Sementara itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila (dasar negara) yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, soverainitas, dan sosialitas. Hanya dengan ini maka Bhinneka Tunggal Ika akan teraktualisasi.

Ringkas 4: Sistem Tata Negara di Indonesia

A. Hakikat Demokrasi

1. Arti kata dekorasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos*.

- *demos* artinya rakyat,
- *kratos* artinya pemerintahan.

2. Pengertian demokrasi

Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara.

B. Sejarah Perkembangan Demokrasi

- Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di polis-polis (negara-negara kota) Yunani Kuno dengan bentuk demokrasi langsung.
- Selanjutnya, munculnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan.
- Berikut adalah beberapa tokoh pendukung berkembangnya demokrasi.





1. John Locke

John Locke berasal dari Inggris, memberikan tiga rumusan hak-hak dasar manusia, yaitu

- hak atas hidup (*life*),
- hak atas kebebasan (*liberty*), dan
- hak atas kepemilikan (*property*).

2. Montesquieu

Montesquieu berasal dari Prancis, mengemukakan konsep “Trias Politika”, yaitu suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antarlembaga negara (antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
2. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.
3. Terjaminnya hak asasi manusia.
4. Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

6. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik (*public policy*).

7. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.

8. Kebebasan pers atau media massa.

D. Macam-Macam Demokrasi

• Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat:

1. Demokrasi langsung

Demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah kenegaraan.

2. Demokrasi perwakilan atau demokrasi modern

Demokrasi yang dijalankan melalui suatu lembaga perwakilan.

• Berdasarkan paham yang dianut:

1. Demokrasi barat/demokrasi liberal/demokrasi konstitusional
Demokrasi yang menitikberatkan pada kebebasan individu (*individualisme*).

2. Demokrasi timur/demokrasi parlemen/demokrasi rakyat

Demokrasi yang banyak dianut oleh negara yang berpaham Marxisme-Komunisme.

3. Demokrasi Pancasila



Demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Berikut adalah Demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

1. Demokrasi liberal/parlementer

Demokrasi liberal/parlementer berlaku pada 3 November 1945–5 Juli 1959 dengan ciri-ciri:

- Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.
- Sistem multipartai.
- Over power* legislatif/partai politik.
- Keterbatasan presiden/eksekutif.

2. Demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku pada tahun 1959–1965 dengan ciri-ciri:

- Over power* presiden/eksekutif.
- Keterbatasan hak peserta rakyat/legislatif.
- Berkembangnya pengaruh komunis.
- Meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik.

3. Demokrasi Pancasila (1965 – sekarang)

Demokrasi Pancasila berlaku mulai tahun 1965 sampai sekarang dengan ciri-ciri:

- Keseimbangan tuntutan masyarakat.
- Keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara.
- Stabilitas masyarakat.
- Pesertaan rakyat.
- Persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat/berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

F. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Berikut adalah sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

- Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan orang lain dengan tidak memPERTENTANGKANNYA.
- Menghindari sikap dan perilaku yang angkuh, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, fanatik, ekstrem, serta meremehkan orang lain.
- Sifat damai dan antikekerasan atas setiap permasalahan dan perbedaan.
- Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Menaati hukum dan peraturan yang berlaku.





G. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila sebagai berikut.

1. Pancasila sila ke-4.
2. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
3. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2).
4. UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1).

H. Pentingnya Demokrasi di Indonesia

Berikut adalah pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Demokrasi dalam kehidupan politik
Demokrasi dalam kehidupan politik diterapkan dalam kegiatan pemilu.
2. Demokrasi dalam kehidupan ekonomi
Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmati kemakmuran.

I. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

1. Dasar hukum pelaksanaan pemilu

Dasar hukum pelaksanaan pemilu sebagai berikut.

- a. Pancasila sila ke-4
- b. UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 1-6
- c. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

2. Asas pemilu

Asas pemilu sebagai berikut.

L-U-BE-R-JUR-DIL

(Langsung-Umum-Bebas-Rahasia-Jujur-Adil)

- a. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya tanpa perantara.
- b. Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih.
- c. Bebas artinya pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan.
- d. Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun.
- e. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur.
- f. Adil artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu





diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan.

3. Tujuan pemilu dan peserta pemilu

Tujuan pemilu dan peserta pemilu sebagai berikut.

- a. Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pesertanya adalah partai politik.
- b. Memilih anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan.
- c. Memilih presiden dan wakil presiden, pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik.

4. Penyelenggaraan pemilu

Penyelenggaraan pemilu adalah sebuah badan independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5. Sistem pemilu

Sistem pemilu sebagai berikut.

- a. Distrik
Sistemnya adalah pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu distrik memiliki jatah satu

kursi di parlemen (DPR/DPRD).

- b. Proporsional
Sistemnya menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara.

J. Hakikat Kedaulatan rakyat

1. Asal istilah kedaulatan

Kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu *supremus* yang berarti kekuasaan tertinggi.

2. Makna kedaulatan

Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.

3. Sifat kedaulatan

Menurut Jean Bodin, sifat kedaulatan sebagai berikut.

- a. Asli
Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- b. Abadi
Kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti.
- c. Tunggal
Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak di-





serahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.

d. Tidak terbatas

Kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain.

K. Macam-Macam Kedaulatan

Macam-macam kedaulatan:

1. Kedaulatan ke dalam (*Interne Souveriniteit*)

Kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kedaulatan ke luar (*Externe Souveriniteit*)

Kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang harus dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

L. Teori-Teori Kedaulatan

Berikut ini adalah beberapa teori-teori kedaulatan.

1. Teori kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan memiliki ciri-ciri:

a. Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan atau bersumber pada Tuhan.

b. Negara dan pemerintah men-

dapatkan kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan (raja mengaku sebagai keturunan Dewa).

2. Teori kedaulatan Raja

Teori kedaulatan Raja memiliki ciri-ciri:

a. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja.

b. Raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas sehingga raja berada di atas undang-undang.

c. Tokoh pencetus:

- Nicollo Machiavelli,
- Thomas Hobbes, dan
- Hegel.

3. Teori kedaulatan negara

Teori kedaulatan negara memiliki ciri-ciri:

a. Kekuasaan tertinggi ada pada negara.

b. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan.

c. Tokoh pencetus:

- Jean Bodin, dan
- George Jellinek.

4. Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum memiliki ciri-ciri:

a. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.

b. Penguasa ataupun rakyat wajib tunduk pada hukum, dan negara



- yang menciptakan hukum.
c. Tokoh pencetus: Krabbe.

5. Teori kedaulatan rakyat

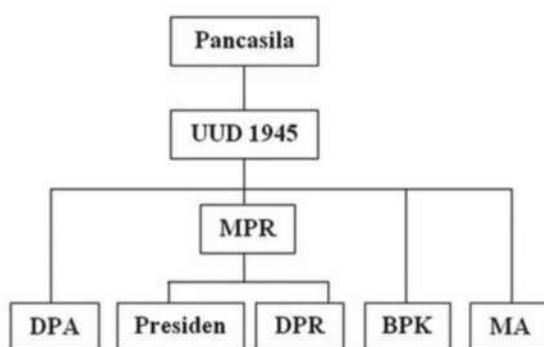
Teori kedaulatan rakyat memiliki ciri-ciri:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat.
- Sumber teori ini adalah ajaran demokrasi.
- Tokoh pencetus:
 - John Locke,
 - Montesquie, dan
 - J. J. Rousseau.

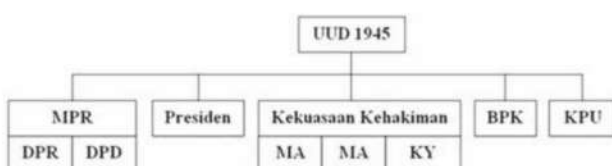
M. Struktur Ketatanegaraan

Terdapat perbedaan yang mencolok pada struktur ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

1. Sebelum amandemen UUD 1945



2. Setelah amandemen UUD 1945



N. Kedaulatan Rakyat di Indonesia

1. Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat

Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, antara lain:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Presiden
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Mahkamah Agung (MA)
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Komisi Yudisial (KY)
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Pemerintah Daerah (Pemda)
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2. Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat

- Landasan idiil: Pancasila.
- Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945.

3. Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas dan wewenang MPR adalah:

- Mengubah dan menetapkan UUD.



- (2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

b. Presiden

Tugas dan wewenang Presiden adalah:

- (1) Menjalankan UU.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- (3) Mengajukan RUU.
- (4) Membentuk Perppu.
- (5) Mengajukan RAPBN.
- (6) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.
- (7) Menetapkan perang dengan persetujuan DPR.
- (8) Mengangkat duta dan konsul.
- (9) Menerima duta dari negara lain.
- (10) Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
- (11) Memberi gelar dan tanda jasa.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Tugas DPR adalah:
 - (1) Menetapkan RAPBN bersama presiden.
 - (2) Menetapkan RUU.

- (3) Mengawasi jalannya pemerintahan.

- Hak-hak yang dimiliki DPR sebagai berikut.

- (1) Hak angket

Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.

- (2) Hak interpelasi

Hak untuk meminta keterangan kepada presiden.

- (3) Hak imunitas

Hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan dalam sidang karena pernyataannya dalam sidang.

- (4) Hak mengajukan usul atau pendapat.

- (5) Hak mengajukan usul RUU.

- (6) Hak budget

Hak untuk membahas RAPBN.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tugas BPK adalah:

- (1) BPK berkewajiban

memeriksa tanggung jawab keuangan negara.

- (2) Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.



e. Mahkamah Agung (MA)

Tugas MA adalah:

- (1) Mengawasi jalannya UU.
- (2) Memberi sanksi atas pelanggaran UU.
- (3) Mengadili pada tingkat kasasi.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Tugas dan wewenang MK adalah:

- (1) Menguji kekuatan UU terhadap UUD.
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- (3) Memutuskan pembubaran partai politik.
- (4) Memutus perselisihan hasil pemilu.

g. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas DPD adalah:

- (1) Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah.
- (2) Ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- (3) Memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan dan agama.
- (4) Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.

h. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tugas dan wewenang KPU

adalah:

- (1) Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
- (2) Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
- (3) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
- (4) Penetapan peserta pemilu.
- (5) Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
- (7) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

i. Komisi Yudisial (KY)

Tugas dan wewenang KY adalah:

- (1) Mengawasi perilaku hakim agung.
- (2) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- (3) Mengusulkan nama calon hakim agung.
- (4) Ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim.





O. Sistem Pemerintahan

Berikut adalah macam-macam sistem pemerintahan.

1. Presidensial

Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif.

Ciri-cirinya:

- Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
- Presiden dipilih langsung oleh sebuah badan atau dewan pemilihan.
- Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.
- Presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif.
- Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
- Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

2. Parlementer

Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini,

parlemen berwenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan.

Ciri-cirinya:

- Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen.
- Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota parlemen.
- Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
- Kepala negara (raja/ratu atau presiden) dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

3. Semipresidensial

Semipresidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sering disebut dualisme eksekutif atau kepemimpinan rangkap karena memimpin presiden dan perdana menteri.

Ciri-cirinya:

- Presiden republik dipilih melalui hak pilih umum.
- Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.



- c. Perdana menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya.

P. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah presidensial.

Ciri-cirinya:

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Sumber: UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2.
2. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
Sumber: UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3.
3. Anggota MPR (DPR dan DPD), presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Sumber: UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1.
4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, artinya kekuasaan antara presiden dan DPR adalah sejajar.
Sumber: UUD 1945 Pasal 7C.
5. Menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Sumber: UUD 1945 Pasal 17 Ayat 1 dan 2.

6. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Sumber: UUD 1945 Pasal 20 Ayat 1.

Q. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan peraturan negara tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut.

- a. Ketetapan
Yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
- b. Keputusan
Yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

3. Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Perppu merupakan peraturan yang





dibuat oleh pemerintah dalam hal kepentingan yang memaksa (sumber: Pasal 22 UUD 1945). Ketentuannya adalah:

- a. Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.
- b. DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.
- c. Jika ditolak DPR, Perppu harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU.

6. Keputusan presiden (Keppres)

Keppres merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi.

7. Peraturan daerah (Perda)

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Jenis-jenis Perda:

- a. Perda provinsi
Perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur.
- b. Perda Kabupaten/Kota
Perda Kabupaten/Kota dibuat

oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati.

- c. Peraturan desa atau yang setingkat
Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat.

R. Fungsi dan Kedudukan Peraturan Perundang-undangan

1. Fungsi peraturan perundang-undangan

- a. Untuk memberikan kepastian hukum.
- b. Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
- c. Untuk memberikan rasa keadilan.
- d. Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

2. Kedudukan peraturan perundang-undangan

- a. Sebagai hukum bagi warga negara.
- b. Menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara.

S. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional

1. Asas penyusunan peraturan perundang-undangan

- a. Asas hierarki





- Artinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
Artinya, hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang (DPR dan MK).
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - d. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.
 - e. Undang-undang tidak berlaku surut
Artinya, peraturan tidak berlaku di waktu sebelum diundangkannya, kecuali dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.
 - f. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
 - g. Konsistensi
Artinya, tidak ada pasal-pasal yang bertentangan, baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lain.

2. Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan

- a. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
 - (1) RUU yang berasal dari presiden
RUU yang berasal dari presiden dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf ahli menjadi draf RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR.
 - (2) RUU yang berasal dari DPR
RUU yang berasal dari DPR akan diproses oleh Panitia Ad Hoc DPR yang selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.
- b. Proses pengajuan RUU
 - (1) RUU diajukan oleh presiden kepada DPR dan oleh DPR itu sendiri.
 - (2) DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang (UU).
- c. Proses pembahasan RUU
RUU yang diajukan oleh presiden atau oleh DPR diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR





- d. Proses penetapan RUU menjadi UU
RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR.
- e. Pengesahan dan pemberlakuan UU
Setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, UU tersebut disahkan oleh presiden untuk diundangkan oleh menteri sekretaris negara dalam lembaran negara tentang berlakunya UU tersebut.

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- b. Presiden

4. Kerangka peraturan perundang-undangan

- a. Judul
Pada bagian ini berisi:
 - jenis,
 - nomor,
 - tahun perundangan, dan
 - nama peraturan perundang-undangan.
- b. Pembukaan
Pada bagian ini berisi:
 - Kata-kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”,

- jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan,
- konsideran, dasar hukum, dan
- dictum.

c. Batang tubuh atau isi

Pada bagian ini terdiri atas:

- bab,
- pasal,
- ayat,
- ketentuan peralihan,
- ketentuan penutup,
- pengesahan, dan
- pengundangan.

T. Otonomi Daerah

1. Arti kata otonomi

Istilah “otonomi” berasal dari bahasa latin, yaitu

- auto artinya sendiri, dan
- nomos artinya aturan.

Jadi, arti kata otonomi adalah pengaturan sendiri.

2. Pengertian otonomi daerah

Otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.





Sumber: UU No. 32 Tahun 2004.

3. Nilai dasar otonomi daerah

a. Kebebasan

Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.

b. Partisipasi

Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.

c. Efektivitas dan efisiensi

Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif), dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisiensi).

4. Tujuan otonomi daerah

a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

b. Pengembangan kehidupan demokrasi.

c. Keadilan.

d. Pemerataan.

e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI.

f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

5. Asas dan prinsip pemerintahan daerah

a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.

c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

6. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

e. Penanganan bidang kesehatan.

f. Penyelenggaraan pendidikan



dan alokasi sumber daya manusia potensial.

- g. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
- h. Pengendalian lingkungan hidup.
- i. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan.
- j. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Bentuk dan susunan pemerintah daerah

a. DPRD sebagai badan legislatif daerah

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- Tugas dan wewenang DPRD, antara lain:
 - (1) Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 - (2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama

dengan kepala daerah.

- (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, dan kerja sama internasional di daerah.
 - (4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
 - (5) Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Hak-hak yang dimiliki anggota DPRD, antara lain:
 - (1) Hak interpelasi
 - (2) Hak angket
 - (3) Hak menyatakan pendapat mengajukan rancangan Perda
 - (4) Hak memilih dan dipilih
 - (5) Hak imunitas

b. Kepala daerah sebagai badan eksekutif daerah

- Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur.



- Pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota.
- Gubernur/bupati/walikota yang biasa disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah.
- Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
 - (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - (2) Mengajukan rancangan Perda.
 - (3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - (4) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - (5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

U. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

1. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (publik).

2. Tujuan penerapan kebijakan publik

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Melindungi hak-hak masyarakat.
- c. Mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat.
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Komponen yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan publik

Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti:

- a. manusia,
- b. dana,
- c. sarana dan prasarana.

Sebagai warga yang baik, kita harus ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi tersebut dapat dilakukan





pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam menikmati hasilnya. Akibat ketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Ringkas 5: Hak Asasi Manusia (HAM)

A. Hakikat Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

- Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Menurut UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

2. Ruang lingkup HAM

HAM meliputi:

- a. Bersifat pokok atau dasar
 - (1) Hak hidup
 - (2) Hak kebebasan/kemerdekaan
 - (3) Hak memiliki sesuatu
- b. Berkembang dalam kehidupan sehari-hari
 - (1) Hak asasi pribadi
Contoh:
Hak memeluk agama, hak mengemukakan pendapat, dan hak berorganisasi.
 - (2) Hak asasi ekonomi
Contoh:
Hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual, serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
 - (3) Hak asasi politik
Contoh:
Hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat dan hak untuk memilih serta dipilih dalam pemilu.
 - (4) Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.
 - (5) Hak asasi sosial budaya
Contoh:
Hak mendapatkan pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan.



B. Latar Belakang HAM

Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang HAM adalah:

1. Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
3. Desakan masyarakat untuk lebih mengembangkan kehidupan demokratis dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menyalurkan hak-hak yang dimilikinya.

C. Instrumen HAM

Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Instrumen HAM di dunia internasional:

1. Piagam PBB (Universal Declaration of Human Rights) atau deklarasi umum hak-hak asasi manusia disahkan tanggal 10 Desember 1948.
2. Instrumen hukum lainnya yang telah disahkan dan diterima di Indonesia.

D. Piagam Perlindungan dan Penegakan HAM

Piagam yang memuat perlindungan dan penegakan HAM di dunia internasional (PBB) adalah Universal Declaration of

Human Rights lahir pada tanggal 10 Desember 1948.

Berikut adalah piagam yang memuat perlindungan dan penegakan HAM di berbagai negara.

1. Inggris
 - a. Magna Charta (Piagam Agung) lahir pada tahun 1215.
 - b. Petition of Rights lahir pada tahun 1628.
 - c. Habeas Corpus Act lahir pada tahun 1679.
 - d. Bill of Rights lahir pada tahun 1689.
2. Amerika Serikat
Declaration of Independence of The United States lahir pada tahun 1776.
3. Prancis
Declaration des droits de l'homme et du Citoyen lahir pada tahun 1789.
4. Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 lahir pada tanggal 18 Agustus 1945.

E. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

1. Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang HAM di Indonesia
 - a. Adanya komitmen untuk melaksanakan UUD 1945 hasil amandemen.
 - b. Melaksanakan amanat TAP MPR No.XVII/MPR/1998 HAM.
 - c. Pada hakikatnya manusia se-



bagai makhluk Tuhan yang paling mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

- d. Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
- e. Desakan masyarakat untuk lebih mengembangkan kehidupan demokratis dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menyalurkan hak-hak yang dimilikinya.

2. Instrumen HAM di Indonesia:

- a. UUD 1945 Pasal 27, 28, 28 A-J, 29 Ayat (2), 30, dan 31.
- b. TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM.
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- d. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM.
- f. PP No. 3 Tahun 2003 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM.

F. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini.

Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai berikut.

- Kasus Tanjung Priok tahun 1984 di Jakarta.
- Kasus terbunuhnya aktivis buruh Marsinah tahun 1994 di Nganjuk, Jawa Timur.
- Kasus terbunuhnya wartawan harian umum Bernas, Udin, di Yogyakarta tahun 1996.
- Kasus penembakan mahasiswa Trisakti.

Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilaporkan ke Komnas HAM sebagai berikut.

- Masalah agama.
- Masalah tanah.
- Masalah perburuhan.
- Masalah perbuatan oknum aparat birokrasi yang menyimpang atau tidak terpuji.



G. Cara Menangani Pelanggaran HAM

Cara untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM, antara lain.

1. Memproses setiap pelanggaran HAM menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mengajukan semua pelanggaran HAM ke pengadilan HAM.
3. Memberikan hukuman yang berat kepada semua pelanggar HAM dengan maksud memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya.

H. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Berikut adalah lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

a. Tujuan Komnas HAM

Tujuan dibentuknya Komnas HAM menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 75 adalah:

- (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.
- (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk berkembangnya pribadi manusia Indonesia

seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

b. Fungsi Komnas HAM

- (1) Pengkajian dan penelitian tentang HAM.
- (2) Penyuluhan tentang HAM.
- (3) Pemantauan tentang HAM.
- (4) Mediasi tentang HAM.

c. Tugas dan wewenang Komnas HAM

- (1) Mengamati pelaksanaan HAM kemudian menyusunnya menjadi sebuah laporan.
- (2) Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM.
- (3) Memanggil pihak pengadu atau korban juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
- (4) Memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya.
- (5) Meninjau tempat kejadian atau tempat yang dianggap perlu.
- (6) Memanggil pihak terkait untuk memberikan dan





menyerahkan dokumen asli tertulis dengan persetujuan ketua pengadilan.

- (7) Melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lain dengan persetujuan ketua pengadilan.
- (8) Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.

2. Pengadilan HAM

Menurut pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999, Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat.

a. Jenis pelanggaran HAM berat

- (1) Kejahatan genosida
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama.

Contoh:

- Membunuh anggota kelompok.
- Memaksakan tindakan-tindakan

yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok.

- Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

- (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagaibagiandariserangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Contoh:

- Perbudakan.
- Pengusiran secara paksa.
- Perampasan kemerdekaan.
- Penghilangan orang secara paksa.

b. Tugas dan wewenang Pengadilan HAM

- (1) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.
- (2) Memeriksa dan menurut perkara pelanggaran HAM





berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga Negara Indonesia.

- (3) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan.

3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

LBH adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Peran dan fungsi LBH sebagai berikut.

- a. Relawan yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum.
- b. Pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.
- c. Pembela dalam melindungi HAM.
- d. Penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM.

4. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi

Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi merupakan kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta

bantuan di bidang hukum dan HAM.

Tujuan:

- a. Sebagai pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum dan HAM.
- b. Sebagai wahana pelatihan, pembelaan, dan penegakan hukum serta HAM.

Ringkas 6: Sejarah Nasional Indonesia

A. Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional

Kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Kolonialis Barat membuat para pejuang mencari strategi baru dalam mencapai kemerdekaan. Strategi baru yang dilakukan dengan mendirikan organisasi modern.

B. Faktor-Faktor yang Mendorong Timbulnya Pergerakan Nasional

1. Faktor intern (dari dalam)

- a. Penderitaan rakyat yang berkepanjangan.
- b. Kenangan kejayaan masa lalu.
- c. Lahirnya golongan terpelajar.



2. Faktor ekstern (dari luar)

- Timbulnya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme.
- Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905.
- Gerakan Turki Muda.
- Revolusi nasional Cina.

C. Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia

1. Budi Utomo

Tokoh pelopor:

Wahidin Sudirohusodo.

Lahir : 20 Mei 1908

Ketua : dr. Sutomo

2. Sarekat Islam (SI)

Tokoh pendiri : H. Samanhudi

Lahir : di Surakarta

pada tahun 1911

Organisasi SI semula bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), untuk memperluas gerak usahanya maka SDI diubah menjadi SI. Pada tahun 1921 SI pecah menjadi dua, yaitu: SI Merah pimpinan Semaun dan SI Putih pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.

3. Indische Partij

Tokoh pendiri: Tiga serangkai

- Dr. Douwes Dekker,
- dr. Cipto Mangunkusumo, dan

- Suwardi Suryaningrat.

Lahir: di Bandung, tanggal 25 Desember 1912

Usaha-usaha yang dilakukan, antara lain:

- menerapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia;
- berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia (Hindia);
- memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan;
- memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya.

4. Perhimpunan Indonesia (PI)

Tokoh pendiri:

Para mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, antara lain

- R.P. Sosrokartono dan
- R. Husein Jayadiningrat.

Kegiatan PI pada mulanya mengadakan pertemuan antar-anggota untuk mendiskusikan nasib bangsa. PI menerbitkan majalah *Hindia Poetera* untuk memuat tulisan para anggotanya.

5. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Tokoh pendiri : Ir. Soekarno

Lahir : di Bandung pada 4 Juli 1927





Pada tahun 1930, para tokoh PNI ditangkap karena kegiatan-kegiatannya dianggap membahayakan kolonialis Belanda.

6. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Lahir: 25 Desember 1935

Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan Parindra, antara lain:

- a. Pendidikan kepada rakyat.
- b. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

7. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Tokoh pendiri : A.K. Gani, Mr. Moh. Yamin, dan Mr. Amir Syarifudin.

Lahir : di Jakarta pada 24 Mei 1937

Tujuan Gerindo untuk Indonesia merdeka dengan asas nasionalis dan demokrasi.

8. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Lahir: 21 Mei 1939

GAPI merupakan gabungan dari partai-partai politik yang ada di Indonesia.

Latar belakang terbentuknya GAPI, yaitu menuntut kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan Belanda

secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 10 tahun.

9. Pergerakan wanita

Tokoh pelopor: R.A. Kartini

R.A. Kartini memengaruhi kaum wanita untuk memperjuangkan emansipasi. Oleh karena itu, muncullah tokoh-tokoh wanita, antara lain:

- a. Dewi Sartika mendirikan “Sekolah Kautamaan Istri” di Bandung, pada 1954.
- b. R.A. Sabarudin dan R.A. Sutinah Joyopranoto mendirikan Putri Merdiko.

Perkembangan dari pergerakan wanita adalah kongres wanita Indonesia yang diadakan pada 22-28 Desember 1928 di Yogyakarta. Berdasarkan hasil kongres, terbentuklah Perserikatan Istri Indonesia (PII).

D. Pendudukan Militer Jepang di Indonesia

1. Awal masuknya Jepang di Indonesia

Faktor-faktor penyebab Jepang berhasil masuk ke Asia Timur dan Asia Tenggara adalah

- a. Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii, pada tanggal 7 Desember 1941.





- b. Negara-negara induk (Inggris, Prancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman.
- c. Bangsa-bangsa Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang “Tiga A”.
 - Jepang Pemimpin Asia
 - Jepang Cahaya Asia
 - Jepang Pelindung Asia

2. Tujuan masuknya Jepang di Indonesia

Tujuan awal Jepang masuk ke Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya dan menjajah Indonesia.

3. Kebijakan pemerintah Jepang

- a. Bidang ekonomi
 - (1) Perluasan areal persawahan untuk meningkatkan produksi beras.
 - (2) Melakukan pengawasan pertanian dan perkebunan yang bertujuan untuk mengendalikan harga barang.
- b. Bidang pemerintahan
 - (1) Pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan yang sangat diktator.
 - (2) Untuk memudahkan pengawasan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian yang bertujuan agar

semua daerah dapat dikendalikan untuk kepentingan pemerintahan bala tentara Jepang.

- c. Bidang militer
 - (1) Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi, baik militer maupun semiliter, dengan tujuan bangsa Indonesia mau membantu pemerintahan Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan sekutu.
 - (2) Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintahan Jepang sebagai berikut.
 - Seinendan (barisan pemuda)
 - Keibodan (barisan pembantu polisi)
 - Fujinkai (barisan wanita)
 - Heiho (pembantu prajurit Jepang)
 - Syuisyintai (barisan pelopor)
 - Jawa Hokokai (perhimpunan kebaktian rakyat Jawa)
 - PETA (Pembela Tanah Air)
- d. Bidang sosial budaya
 - (1) Pada masa pemerintahan



Jepang, media massa diawasi dengan ketat.

- (2) Namun demikian, surat kabar dan radio ikut berfungsi memperluas perkembangan bahasa Indonesia.

E. Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Jepang

Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang melalui berbagai perjuangan seperti berikut.

1. Perjuangan melalui organisasi buatan Jepang

Dengan cara: Memanfaatkan gerakan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA).

Lahir : 1 Maret 1943

Pimpinan : Empat serangkai

- Ir. Soekarno,
- Moh. Hatta,
- Ki Hajar Dewantara, dan
- K.H. Mas Mansyur.

Tujuan PUTERA:

- Agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang.
- Namun, oleh para pemimpin Indonesia, PUTERA justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang.

2. Memanfaatkan Barisan Pelopor (Syuisyintai)

Ketua : Ir. Soekarno

Kepala sekretariat : Sudiro

Anggota:

- Chaerul Saleh,
- Asmara Hadi,
- Sukardjo Wiryopranoto, dan
- Otto Iskandar Dinata.

Tujuan: Penyalur aspirasi nasionalisme.

3. Memanfaatkan Badan Penasihat Pusat (Chuo Sangi In)

Lahir: 5 September 1943, atas dasar anjuran Jenderal Hideki Tojo (Perdana Menteri Jepang).

Ketua : Ir. Soekarno

Anggota: 23 orang Jepang dan 20 orang Indonesia

Tujuan:

- Tugas badan ini adalah memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan (penguasa tertinggi militer Jepang di Indonesia).
- Para pemimpin Indonesia memanfaatkan Chuo Sangi In untuk menggembelng kedisiplinan.

4. Perjuangan melalui organisasi Islam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

Lahir : 21 September 1937

Tokoh pelopor:

- K.H. Mas Mansur,
- K.H. Wahab Hasbullah, dan
- Wondoamiseno.

MIAI merupakan perkumpulan





organisasi Islam. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri. Hal ini merupakan pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik.

5. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah (sembunyi-sembunyi)
 - a. Gerakan kelompok Sutan Syahrir
 - b. Gerakan kelompok Amir Syarifuddin
 - c. Golongan persatuan mahasiswa
 - d. Kelompok Sukarni
 - e. Kelompok pemuda Menteng 31
6. Perjuangan bersenjata
Perjuangan bersenjata adalah perlawanan menggunakan senjata.
 - a. Perjuangan bersenjata yang dilakukan rakyat
 - Perlawanan rakyat di Cot Pleing, Aceh, pada 10 November 1942.
 - Perlawanan rakyat di Pontianak pada 16 Oktober 1943.
 - Perlawanan rakyat di Singapermana, Jawa Barat, pada 25 Februari 1944.
 - Perlawanan rakyat di Cidempet, Indramayu, pada 30 Juli 1944.

- Perlawanan rakyat di Irian Jaya, pada 1944.
 - b. Perlawanan bersenjata yang dilakukan PETA
 - Perlawanan PETA di Blitar, pada 29 Februari 1945.
 - Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh, pada November 1944.
 - Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap, pada April 1945.

F. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

1. Alasan Jepang membentuk BPUPKI

- Pada akhir 1944, posisi Jepang di berbagai kawasan mulai terdesak. Keadaan ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut.
 - a. Jepang terus menerus mengalami kekalahan dari serbuan Sekutu dalam Perang Pasifik.
 - b. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA.
- Pada 17 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso.





Tugas utama perdana menteri baru (Jenderal Kuniaki Koiso) adalah memulihkan kewibawaan Jepang di hadapan bangsa-bangsa Asia yang baru saja dibebaskan oleh Jepang dari cengkeraman imperialis Eropa. Langkah politik Perdana Menteri Koiso terhadap Indonesia, antara lain:

- a. Menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang.
 - b. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Jepang memberikan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang.
- Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai.

2. Peresmian BPUPKI

- BPUPKI secara resmi berdiri pada 28 Mei 1945.
- Ketua : K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.
- Anggota:
67 orang yang terdiri dari

tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari berbagai daerah dan aliran.

3. Sidang BPUPKI

Sidang BPUPKI diselenggarakan untuk menyusun dasar dan konstitusi Negara Indonesia

a. Sidang I : 29 Mei–1 Juni 1945

Tujuan : Merumuskan dasar negara Indonesia.

1) Pada 29 Mei 1945

Muh.Yamin mengemukakan lima asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu:

- (i) Peri kebangsaan
- (ii) Peri kemanusiaan
- (iii) Peri ketuhanan
- (iv) Peri kerakyatan
- (v) Kesejahteraan rakyat

2) Pada 31 Mei 1945

Prof. Dr. Mr. Soepomo menyampaikan dasar-dasar untuk Indonesia merdeka, yaitu

- (i) Persatuan
- (ii) Kekeluargaan
- (iii) Keseimbangan lahir batin

(iv) Musyawarah

(v) Keadilan rakyat

3) Pada 1 Juni 1945

Ir.Soekarno mengemukakan lima rumusan dasar Negara



Indonesia merdeka, yaitu

- (i) Kebangsaan Indonesia
- (ii) Internasionalisme atas perikemanusiaan
- (iii) Mufakat dan demokrasi
- (iv) Kesejahteraan sosial
- (v) Ketuhanan Yang Maha Esa

BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal Panitia Sembilan, terdiri dari:

Ketua : Ir. Soekarno

Anggota:

- Drs. Moh. Hatta
- Muh. Yamin
- Ahmad Soebarjo
- A.A. Maramis
- Abdulkahar Muzakkir
- Wahid Hasyim
- Haji Agus Salim
- Abikusno Cokrosuyoso

b. Pada 22 Juni 1945

Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Sembilan yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Dokumen laporan tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan dasar Negara Indonesia merdeka berdasarkan Piagam Jakarta sebagai berikut.

- (i) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

luknya.

- (ii) (Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (iii) Persatuan Indonesia.
- (iv) (Dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- (v) (Serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Sidang II : 10-17 Juli 1945

Tujuan : Membahas rencana undang-undang dasar, termasuk pembukaan atau preambulenya oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Ir. Soekarno.

Hasil keputusan sidang II:

- 1) Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka.
- 2) Piagam Jakarta menjadi pembukaan Hukum Dasar itu.

Pembukaan Hukum Dasar diambil dari Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai berikut.

- 1) Pada alinea ke-4, pernyataan Hukum Dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar.
- 2) “... berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”





kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”,

diganti dengan

“berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

- 3) Di antara “Permusyawaratan perwakilan” dalam Undang-Undang Dasar ditambah dengan garis miring (/).

G. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

1. Pembentukan PPKI

- Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan.

Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai.

Ketua : Ir. Soekarno

Wakil : Drs. Mohammad Hatta

Penasihat : Ahmad Subardjo

- Pada 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat

dipanggil menghadap Marsekal Terauchi di Dalath, Vietnam. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut.

- a. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia.
- b. Untuk pelaksanaan kemerdekaan telah dibentuk PPKI.
- c. Pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa kemudian pulau-pulau lain.
- d. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

2. Perbedaan pandangan antarkelompok pejuang

Setelah Jepang mengalami kekalahan di berbagai kawasan, muncul perbedaan antarkelompok pejuang mengenai masalah proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

- a. Kelompok pejuang senior (golongan tua)

Kelompok pejuang senior anggota PPKI dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang





dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu.

b. Kelompok pemuda (golongan muda)

Kelompok pejuang bawah tanah yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI yang dibentuk oleh Jepang.

Pada 15 Agustus 1945, pihak pemuda mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, tetapi Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menolak usulan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis.

Tidak adanya kesepakatan antara kelompok pejuang senior dengan kelompok pejuang muda menyebabkan kelompok pejuang muda mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta keluar dari Jakarta. Para pemuda beranggapan kedua tokoh tersebut telah dipengaruhi oleh pihak Jepang.

3. Sidang PPKI

PPKI mengadakan sidang-sidang

untuk melengkapi syarat terbentuknya negara serta upaya memenuhi kelengkapan pemerintahan yang diperlukan.

a. Sidang PPKI I : 18 Agustus 1945
Pimpinan sidang : Soekarno dan Hatta.

Anggota : 27 orang

Hasil keputusan sidang:

- 1) Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
- 3) Rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas presiden.

b. Sidang PPKI II: 19 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang:

- 1) Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden.
- 2) Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya.
- 3) Diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tentara kebangsaan.

c. Sidang PPKI III: 22 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang:





- 1) Membentuk Komite Nasional Indonesia.
- 2) Membentuk PNI sebagai satu-satunya partai di Indonesia (tetapi kemudian dibatalkan).
- 3) Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

H. Peristiwa Rengasdengklok

- Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa yang diawali oleh adanya perbedaan pandangan antara kelompok muda dengan kelompok tua tentang waktu dan cara pelaksanaan proklamasi.
- Rengasdengklok adalah nama daerah yang berada di sebelah Utara Karawang, Jawa Barat.
- Alasan memilih Rengasdengklok karena Rengasdengklok menjadi satu-satunya daerah yang bebas dari kekuasaan Jepang serta letaknya yang jauh dari Jakarta.
- Arti pertemuan Rengasdengklok, bukti adanya keinginan semua pihak untuk hidup merdeka.
- Tokoh yang terkait dalam peristiwa Rengasdengklok:
 1. Golongan tua:
 - Ir. Soekarno,
 - Drs. Moh. Hatta, dan
 - Ahmad Soebardjo.
 2. Golongan muda:

- Sudanco Singgih,
- Yusuf Kunto,
- Sukarni,
- Sudanco Subeno, dan
- Iwa Kusumasumantri.

I. Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi merupakan puncak kesadaran berbangsa dan cita-cita kemerdekaan sejak lahirnya Boedi Utomo 1908. Proklamasi bukan akhir perjuangan dalam bentuk pemerintahan yang berdaulat, tetapi awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

J. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan
 - Tempat perumusan: rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta.
 - Tokoh-tokoh penyusun naskah proklamasi:
 - Ir. Soekarno,
 - Drs. Moh. Hatta, dan
 - Ahmad Soebardjo.
 - Tokoh-tokoh saksi penyusunan naskah proklamasi:
 - Sudiro,
 - B.M. Diah dan





- Sukarni.
 - Tokoh pengetik naskah proklamasi: Sayuti Melik
 - Tokoh yang menandatangani naskah proklamasi:
 - Ir. Soekarno, dan
 - Drs. Moh. Hatta
- Atas usul Sukarni, naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
2. Upacara proklamasi kemerdekaan
- Awalnya, sesuai kesepakatan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada namun ternyata pasukan Jepang telah mengepung.
 - Kemudian, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan diselenggarakan di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang.
 - Proses proklamasi dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.
3. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan

Berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui:

- Kantor berita Domei
 - Radio
 - Kawat telepon
 - Surat kabar
 - Utusan (kurir) ke berbagai daerah
 - Pamflet, poster, dan coretan-coretan pada tembok
4. Proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia
- Unsur-unsur yang harus dilengkapi bagi berdirinya negara baru adalah:
- a. Rakyat
 - b. Wilayah
 - c. Pemerintahan yang berdaulat
 - d. Pengakuan dari negara lain Indonesia memperoleh pengakuan dari negara lain pertama kali, yaitu Mesir.

K. Konflik Indonesia dengan Belanda

Faktor penyebab konflik Indonesia-Belanda adalah kedatangan tentara Sekutu dan NICA

- **Pada 14 Agustus 1945**

Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu menunjukkan secara de jure (berdasarkan hukum)



wilayah jajahan Jepang dikuasai Sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia II.

- **Pada 29 September 1945**

Pasukan Sekutu mendarat di Indonesia bertugas melucuti tentara Jepang. Namun, komando pertahanan Sekutu di Asia Tenggara yaitu South East Asia Command (SEAC) membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI memiliki tugas utama mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Karena Sekutu secara diam-diam membawa orang-orang Netherland Indies Civil Administration (NICA) atau pegawai-pegawai Belanda, bangsa Indonesia curiga dan akhirnya menimbulkan permusuhan.

Kedatangan Belanda (NICA) berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia dengan cara mempersenjatai kembali Koninklijk Netherland Indisch Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang NICA dan KNIL yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan.

L. Pengaruh Konflik Indonesia-Belanda

1. Terbentuknya negara-negara bagian

Belanda menghendaki sebanyak mungkin negara bagian dalam RIS sebagai negara bonekanya. Negara-negara yang dibentuk Belanda sebagai berikut.

- a. Negara Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku).
- b. Negara Sumatra Timur.
- c. Negara Madura.
- d. Negara Pasundan.
- e. Negara Sumatra Selatan.
- f. Negara Jawa Timur.

2. Perjuangan kembali ke Negara Republik Indonesia

Pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang-undang yang dikenal dengan UUDS pada 15 Agustus 1950.

M. Perjuangan Rakyat Indonesia di Berbagai Daerah

Konflik Indonesia-Belanda menimbulkan pergerakan dalam bentuk perjuangan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah sebagai berikut.





1. Pertempuran Surabaya

Pada awalnya, pemerintah Jawa Timur tidak mau menerima kedatangan Sekutu, namun akhirnya ada kesepakatan sebagai syarat Sekutu Inggris diperbolehkan memasuki kota Surabaya, yaitu

- a. Inggris berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda.
- b. Menjalinkan kerja sama antara Inggris dengan Indonesia untuk menciptakan keamanan dan perdamaian.
- c. Akan dibentuk kontak biro agar kerja sama berjalan lancar.
- d. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.

Ternyata, pada pelaksanaannya Inggris mengingkari kesepakatan tersebut berupa:

- Pada tanggal 26 Oktober 1945, Inggris melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok.
- Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka. Rakyat Surabaya meresponsnya dengan mengangkat senjata melawan Sekutu Inggris pada 27 Oktober 1945.

Untuk menghindari kontak senjata yang meluas, Presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan Jenderal D.C. Hawthorn. Namun, hasil perundingan tersebut dilanggar kembali oleh Sekutu Inggris. Akhirnya, kontak senjata tidak dapat dihindari dan kembali meletus pada 10 November 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Pada pertempuran tersebut, Bung Tomo melalui siaran radio berpidato untuk membangkitkan semangat juang arek-arek Surabaya.

2. Pertempuran Ambarawa

Penyebab Pertempuran Ambarawa adalah kedatangan tentara Sekutu di Semarang, yang pada awalnya bertujuan untuk mengurus tawanan perang. Namun, secara diam-diam Sekutu yang diboncengi NICA telah mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang sehingga pecahlah Pertempuran Ambarawa antara TKR dengan tentara Sekutu pada 21 November–15 Desember 1945.

3. Pertempuran Medan Area

Pemicu Pertempuran Medan Area adalah ketika lencana merah putih





diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan banyak korban luka-luka. Pertempuran pertama kali pecah pada 13 Oktober 1945. Bentrokan antara tentara Sekutu dengan rakyat kemudian menjalar ke seluruh Kota Medan, yang dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area.

N. Perjuangan Bangsa Indonesia merebut Irian Barat

Konflik Indonesia-Belanda kembali memanas dalam hal perebutan Irian Barat. Merujuk pada salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan pada 23 Agustus–2 September 1949, kejelasan mengenai kedudukan Irian Barat akan ditentukan se– lambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.

Namun nyatanya setelah ditunggu bertahun-tahun, Belanda tidak juga mau membicarakannya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memutuskan untuk berjuang merebut Irian Barat kembali. Dalam perjuangan tersebut, bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya melalui:

- jalur konfrontasi, dan
- jalur diplomasi.

a. Jalur konfrontasi

Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara konfrontasi politik, ekonomi, dan militer.

- Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikor) dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta.

Isi Trikor adalah sebagai berikut.

- 1) Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda kolonial.
- 2) Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
- 3) Bersiaplah untuk mobilitas umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikor, mulailah konfrontasi total yang bersifat menyeluruh terhadap Belanda.

- Pada Januari 1962 Pemerintahan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar.





Panglima Komando Mandala:
Mayor Jenderal Soeharto.

Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat, dibagi dalam tiga fase yaitu:

- 1) Fase infiltrasi (sampai akhir 1962).
- 2) Fase eksploitasi (mulai awal 1963).
- 3) Fase konsolidasi (awal 1964).

b. Jalur diplomasi

Kesungguhan Indonesia merebut kembali Irian Barat mengundang simpati diplomat Amerika Serikat (AS) untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda menerima dan menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962.

Isi Perjanjian New York sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962.
- 2) Pada 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan

diturunkan pada 31 Desember 1962 untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.

- 3) Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
- 4) Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada 1 Mei 1963.
- 5) Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI. Wujud nyata dari pelaksanaan Persetujuan New York adalah diselenggarakannya Pepera. Hasil Pepera disetujui PBB pada 19 November 1969 dan membuktikan bahwa Irian Barat tetap bagian dari Republik Indonesia.

O. Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1955

Pemilu di Indonesia diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan dalam dua gelombang sebagai berikut.

1. Gelombang I

Dilaksanakan pada 29 Desember 1955

Agenda: memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).





2. Gelombang II

Dilaksanakan pada 15 Desember 1955

Agenda: memilih anggota-anggota Konstituante (badan pembuat UUD). Tugas Konstituante adalah menyusun atau merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi:

- 208 kabupaten,
- 2.139 kecamatan, dan
- 43.429 desa.

Pemilu tahun 1955 diikuti oleh banyak partai politik, organisasi, maupun perorangan (independen) sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi sebagai berikut.

- Fraksi Masyumi, merupakan fraksi terbesar dengan jumlah anggotanya ada 60 orang.
- Fraksi PNI beranggotakan 58 orang.
- Fraksi NU beranggotakan 47 orang.
- Fraksi PKI beranggotakan 32 orang.

Seluruh anggota DPR hasil Pemilu tersebut berjumlah 272 anggota, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

P. Dekret Presiden 5 Juli 1959

- Konstituante (badan pembuat UUD) hasil Pemilu 1955, ternyata sampai tahun 1958 belum berhasil menyusun atau merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Konstituante dianggap gagal menetapkan UUD.
- Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan di Istana Merdeka yang dinamakan Dekret Presiden 5 Juli 1959.
- Isi dari Dekret Presiden adalah:
 1. Pembubaran Konstituante.
 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
 3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Q. Kehidupan Politik Nasional dan Daerah Setelah Kemerdekaan

Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional sejak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960. Beberapa hal yang menjadi persoalan adalah

1. Hubungan pemerintah pusat dan daerah kurang harmonis

Hal ini disebabkan oleh masalah





otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, antara lain:

- a. Di Padang, Sumatra Barat
Berdiri : Dewan Banteng
Pimpinan : Letnan Kolonel Achmad Husein
- b. Di Medan, Sumatra Utara
Berdiri : Dewan Gajah
Pimpinan : Kolonel Simbolon
- c. Di Sumatra Selatan
Berdiri : Dewan Garuda
Pimpinan : Kolonel Barlian
- d. Di Manado, Sulawesi Utara
Berdiri : Dewan Manguni
Pimpinan : Kolonel Ventje Samual

2. Persaingan ideologi

Sejak tahun 1950 persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis mulai terlihat.

Ciri-ciri:

- Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan, dan
- hanya mementingkan golongannya sendiri.

Pada saat itu, kabinet yang berkuasa silih berganti hanya dalam waktu singkat, yaitu tahun

1950-1955. Terdapat empat kabinet yang memerintah, antara lain:

- a. Kabinet Natsir
Masa kerja: 6 September 1950–20 Maret 1951.
- b. Kabinet Sukirman
Masa kerja: 26 April 1951–Februari 1952.
- c. Kabinet Wilopo
Masa kerja: April 1952–2 Juni 1953.
- d. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
Masa kerja: 31 Juli 1953 – 24 Juli 1955.

R. Pemberontakan- Pemberontakan di Daerah

Berikut adalah beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di daerah.

1. Pemberontakan Angkatan Peperang Ratu Adil (APRA) di Bandung, pada 23 Januari 1950.
2. Pemberontakan Andi Azis di Makassar, pada 5 April 1950.
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, pada 25 April 1950.
4. Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Indonesia bagian timur, pada 1 Maret 1957.



5. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra, pada 15 Februari 1958.
6. Peristiwa Madiun (Pemberontakan PKI)
 - Pemberontakan PKI di Madiun, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia.
 - Pemimpin: Amir Syarifudin dan Musso.
 - Tujuan: Meruntuhkan pemerintah RI untuk kemudian diganti dengan pemerintah yang berdasar paham komunis.
 - Pada 18 September 1948 PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya kemudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia.
 - Dalam usaha mengatasi keadaan, Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak.
- Pada 30 September 1948 Seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, lalu dihukum mati.
7. Peristiwa G 30 S/PKI
Pada awal tahun 1960, kondisi ekonomi begitu memprihatinkan dan kondisi sosial politik penuh gejolak. Memanfaatkan situasi tersebut PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan.
Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari 30 September 1965, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok G 30 S/PKI dikenal dengan nama pahlawan revolusi. Berikut daftar nama pahlawan revolusi.
 - a. Letnan Jenderal Ahmad Yani
 - b. Mayor Jenderal R. Suprpto



- c. Mayor Jenderal M.T. Haryono
- d. Mayor Jenderal S. Parman
- e. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
- f. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
- g. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean

Peristiwa pembunuhan oleh G30 S/PKI juga terjadi di Yogyakarta, yang mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan. Akan tetapi puteri beliau yang bernama Ade Irma Nasution tewas akibat tembakan para penculik.

Sebagai reaksi dari pemberontakan ini Presiden Soekarno memberi tugas kepada Mayor Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, untuk memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah:

- a. Pada 1 Oktober 1965
Berhasil merebut kem-

- b. Pada 2 Oktober 1965
Operasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai beberapa tempat penting termasuk daerah sekitar Bandara Halim Perdanakusuma yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September.
- c. Pada tanggal 3 Oktober 1965
Dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya. Atas petunjuk seorang anggota polisi, akhirnya ditemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan.

8. Peristiwa DI/TII

- a. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
 - Pada 7 Agustus 1949
Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia.
 - Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI) sedangkan tentaranya dinamakan





- kan Tentara Islam Indonesia (TII). Pemberontakan ini dikenal dengan nama Pemberontakan DI/TII.
 - Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah.
 - Dalam menghadapi aksi DI/TII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerakan ini.
 - Pada 1960 Pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis” dan operasi “Bratayudha”.
 - Pada 4 Juni 1962 Kartosuwiryo beserta parapengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “Bratayudha” di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat.
- b. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
- Pemimpin: Amir Fatah
 - Wilayah: Brebes, Tegal, dan Pekalongan.
- c. Pemberontakan DI/TII di Aceh
- Pimpinan : Teuku Daud Beureuh
 - Latar belakang: Daud Beureuh merasa kecewa karena status Aceh pada 1950, diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara.
 - Semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi pemberontakan ini.
 - Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin yang menjabat sebagai Pangdam I/Iskandar Muda, pada 17-21 Desember 1962 diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh”



- yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan dapat dipadamkan.
- d. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
- Pimpinan: Kahar Muzakar
 - Latar belakang:
Pada 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.
 - Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan operasi militer.
 - Pada Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati.
- e. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan
- Pimpinan: Ibnu Hajar
 - Pada awalnya pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar

untuk menyerah. Akan tetapi setelah menyerah, Ibnu Hajar melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya, pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap.

S. Peristiwa Politik Penting pada Masa Orde Baru

1. Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

- Latar belakang

- Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara.
- Kondisi ekonomi yang memburuk.
Hal-hal di atas melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi.
- Pada tanggal 10 Januari 1966 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan-kesatuan aksi untuk menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri



Tuntutan Rakyat (Tritura).

Isi Tritura sebagai berikut.

- a. Pembubaran PKI.
- b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI.
- c. Penurunan harga dan perbaikan ekonomi.

2. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini diberikan di Istana Bogor dan dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

3. Sidang Umum MPRS

Sidang Umum IV MPRS diselenggarakan pada 17 Juni 1966 menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkuat tegaknya Orde Baru, yaitu

- a. Ketetapan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.
- b. Ketetapan MPRS No. XXV tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.

- c. Ketetapan MPRS No. XXIII tentang pembaruan landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
- d. Ketetapan MPRS No. XIII tentang pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengembangan Tap MPRS No. IX.

4. Nawaksara

- MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya Pemberontakan G 30 S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral.
- Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal).
- Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden.
- Pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengembangan Ketetapan MPRS No. IX, yaitu Jenderal Soeharto.

5. Pemilihan umum (Pemilu)

- Pemilihan umum pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Diikuti oleh 10 partai yaitu





- PKRI,
 - Nahdatul Ulama (NU),
 - Parmusi,
 - Parkindo,
 - Musyawarah Rakyat Banyak (Murba),
 - Partai Nasional Indonesia (PNI),
 - Perti,
 - Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan
 - Golongan Karya (Golkar).
- Pemilu ini dimenangkan Golkar.
- Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 1977, 1982, 1987, 1992. Pemilu tahun 1977-1997 diikuti oleh tiga organisasi peserta pemilu, yaitu
 - Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
 - Golongan Karya (Golkar), dan
 - Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
- Pemilu-pemilu di Indonesia, selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar.

6. Sidang MPR Tahun 1973

Pada Maret 1973, diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

- a. Tap No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai ganti Manipol/

Manifestasi Politik.

- b. Tap No. IX/MPR/1973 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.
- c. Tap No. XI/MPR/1973 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI.

7. Berakhirnya orde baru

- Latar belakang:

- a. Sejak pertengahan tahun 1996, situasi politik memanas di Indonesia.
- b. Rakyat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, dan demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.
- c. Hasil pemilu 1997 yang memenangkan Golkar dan menguasai DPR/MPR banyak mengandung unsur nepotisme.
- d. Terpilihnya lagi Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat.
- e. Pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
- f. Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara.





Melihat kondisi bangsa Indonesia tersebut, para mahasiswa memelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru.

- Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan Orde Baru sehingga tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

T. Orde Reformasi

- **Pada 7 Juni 1998**

Dilaksanakan pemilu pertama pada orde reformasi yang diikuti 48 partai politik. Suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP).

- **Pada Oktober 1999**

Dalam Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999, terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

- **Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid** tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

- **Kepemimpinan Presiden Megawati** didampingi oleh **Hamzah Haz** yang dipilih melalui voting (pemungutan suara).

- **Pada 5 April 2004**

Dilaksanakan pemilu untuk memilih

anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung**

Pemilu untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan dua putaran, yaitu 5 Juli dan 20 September 2004. Presiden dan wakil presiden terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia.

- **Pada pemilu 2009**

Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi presiden dengan wakilnya adalah Boediono.

- **Pada pemilu 2014**

Joko Widodo terpilih menjadi presiden dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.





Ringkas 7: Hubungan Internasional Indonesia Semasa Perjuangan

Hubungan internasional yang dilakukan Indonesia semasa perjuangan antara lain sebagai berikut.

A. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan keamanan PBB berperan dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).

KTN terdiri dari:

1. Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia.
2. Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda.
3. Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia.

KTN berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan yang berlangsung pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat “Renville” yang sedang berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan Perundingan Renville.

B. Peranan Konferensi Asia di New Delhi

- Waktu Belanda melakukan aksi militernya, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma U Aung San memprakarsai Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi, pada 20-23 Januari 1949. Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB.

Isinya:

1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
 2. Pembentukan pemerintahan ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949.
 3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia.
 4. Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
- Pada 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Belanda dan Indonesia, yang isinya:
 1. Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Indonesia.



2. Pembebasan dengan segera tanpa bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Indonesia oleh Belanda.
3. Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta.
4. Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu secepatnya.
5. Komisi Tiga Negara diganti namanya menjadi Komisi PBB untuk Indonesia (*UNCI/United Nations Commission for Indonesia*). Tugas UNCI untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan.

C. Usaha Diplomasi Indonesia

Berikut beberapa usaha diplomasi Indonesia.

1. Perundingan Linggajati

- Diadakan pada 10 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat.
Pimpinan delegasi Belanda:
Prof. Scermerhorn.
Pimpinan delegasi Indonesia:
Perdana Menteri Sjahrir.
- Pada 25 Maret 1947
Hasil Perundingan Linggajati ditandatangani di Istana Rijswijk (Istana Merdeka), Jakarta.
- Isi Perundingan Linggajati ada-

lah sebagai berikut:

- a. Belanda mengakui secara *de facto* (berdasarkan kenyataan) Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah *de facto* paling lambat 1 Januari 1949.
 - b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
 - c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
- #### 2. Perundingan Renville
- Perundingan ini diadakan pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Renville.
Pimpinan delegasi Indonesia:
Amir Syarifuddin.
Pimpinan delegasi Belanda:
R. Abdulkadir Widjojoatmodjo.
 - Hasil Perundingan Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948.





- Isi perundingan Renville adalah:
 - a. Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia-Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Kerajaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat (NIS).
 - b. Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan penduduk di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatra menginginkan daerahnya bergabung dengan RI atau negara bagian lain dari Negara Indonesia Serikat (NIS).
 - c. Setiap negara (bagian) berhak tinggal di luar NIS atau menyelenggarakan hubungan khusus dengan NIS atau Belanda.
- 3. Persetujuan Roem-Royen**
 - Persetujuan Roem-Royen diselenggarakan pada 7 Mei 1949.
 - Persetujuan Roem-Royen merupakan pernyataan-pernyataan dari dua tokoh, yaitu
 - Mr. Moh. Roem selaku ketua delegasi Indonesia.
 - Dr. Van Royen selaku ketua delegasi Belanda
 - Pernyataan Mr. Moh. Roem, berisi:
 - a. Mengeluarkan perintah kepada “Pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya.
 - b. Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan.
 - c. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) dengan tidak bersyarat.
 - Pernyataan Dr. Van Royen, berisi:
 - a. Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
 - b. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik.
 - c. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah-daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948.
 - d. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS).
 - e. Berusaha dengan sungguh-





sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

4. Konferensi Meja Bundar

- Pada 23 Agustus–2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.
- Isi dari persetujuan KMB adalah:
 - a. Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949.
 - b. Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
 - c. Antara RIS dengan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda.
 - d. Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda.
 - e. Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.

Ringkas 8: Politik Luar Negeri Indonesia

A. Politik Luar Negeri Indonesia

- Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966.
- Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, politik luar negeri RI adalah bebas dan aktif, yaitu tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer.

B. Wujud Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia.
2. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966.
3. Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967.

C. Konferensi Asia Afrika (KAA)

1. Latar belakang KAA

- a. Bangsa-bangsa Asia Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama per-



nah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa.

- b. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan.
- c. Perubahan politik setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu situasi internasional diliputi kecemasan akibat perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.
- d. Di antara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka, masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu.
- e. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan dari negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat.
- f. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam perang dingin.

2. Sejarah terwujudnya KAA

- Terwujudnya KAA didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor.
- Konferensi Colombo
Pelaksanaan: 28 April–2 Mei 1954
Dihadiri oleh wakil dari 5 negara,

- Indonesia : Ali Sastroamidjoyo
- India : Jawaharlal Nehru
- Pakistan : Mohamma Ali Jinnah
- Birma : U Nu
- Sri Lanka : Sri John Kotelawala

- Konferensi Bogor
Pelaksanaan: 28-31 Desember 1954
Tujuan: sebagai kelanjutan dari Konferensi Colombo

3. Tujuan KAA

- a. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia-Afrika.
- b. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta.
- c. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika.
- d. Meninjau kedudukan Asia-Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional.

4. Pelaksanaan KAA

Waktu pelaksanaan: 18–25 April 1955.
Tempat: Gedung Merdeka, Bandung



5. Peserta KAA

Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk 5 negara sponsor), yaitu

- 1) Indonesia
- 2) India
- 3) Birma (Myanmar)
- 4) Pakistan
- 5) Sri Lanka
- 6) Afganistan
- 7) Kamboja
- 8) Laos
- 9) Libanon
- 10) Liberia
- 11) Libya
- 12) Nepal
- 13) Filipina
- 14) Saudi Arabia
- 15) Republik Rakyat Cina
- 16) Mesir
- 17) Ethiopia
- 18) Ghana
- 19) Iran
- 20) Irak
- 21) Jepang
- 22) Yordania
- 23) Sudan
- 24) Syiria
- 25) Thailand
- 26) Turki
- 27) Vietnam Utara
- 28) Vietnam Selatan
- 29) Yaman

6. Hasil-hasil KAA

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

- a. Kerja sama di bidang ekonomi.
- b. Kerja sama di bidang kebudayaan.
- c. Masalah hak asasi manusia.
- d. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka.
- e. Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia.

Selain keputusan-keputusan di atas, KAA juga menghasilkan Dasasila Bandung (Bandung Declaration). Isinya adalah mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerjasama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip (dasasila).

7. Pengaruh KAA

- a. Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Selatan.
- b. Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat.
- c. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia,





India, Birma, dan Sri Lanka mulai diikuti negara-negara lain yang tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur.

D. Association of South East Asia Nations (ASEAN)

1. Latar belakang ASEAN

a. Faktor intern

Lahirnya negara-negara baru di Asia Tenggara setelah berakhirnya Perang Dunia II.

b. Faktor ekstern

Adanya kekhawatiran dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara komunis.

2. Sejarah berdirinya ASEAN

- Deklarasi ASEAN ditandatangani pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh utusan dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara.
- Kelima tokoh yang menandatangani Deklarasi ASEAN adalah:
Indonesia : Adam Malik
Malaysia : Tun Abdul Razak
Singapura : S. Rajaratnam
Filipina : Narsisco Ramos
Thailand : Thanat Khoman
- Kelima negara di atas merupakan anggota ASEAN pada awal berdirinya.

- Saat ini, anggota ASEAN sudah bertambah 5 negara, yaitu
- Brunei Darussalam,
- Vietnam,
- Laos,
- Myanmar, dan
- Kamboja.

3. Tujuan ASEAN

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
- b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
- c. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling bekerjasama dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.
- e. Bekerja sama dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan, perdagangan, komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan, komunikasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat.

4. Peranan Indonesia dalam ASEAN

- a. Indonesia termasuk salah satu





negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.

- b. Indonesia membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina.
- c. Indonesia adalah negara penyelenggara KTT pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali.
- d. Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN.

E. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

1. Proses terbentuknya PBB

Terbentuknya PBB merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain:

- Piagam Atlantik,
- Konferensi Washington,
- Konferensi Moscow, dan
- Konferensi San Fransisco.

2. Tujuan PBB

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
- b. Mengembangkan hubungan persahabatan antar-bangsa.
- c. Mengembangkan kerja sama

internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.

- d. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, dan jenis kelamin, bahasa, dan agama.
- e. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

3. Peranan Indonesia terhadap PBB

- a. Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam Konferensi Asia-Afrika, ASEAN, maupun Gerakan Non Blok.
- b. Secara langsung, Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.
- c. Pada 1985, Indonesia membantu PBB memberikan bantuan pangan ke Ethiopia ketika dilanda bahaya kelaparan.



- d. Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

F. Gerakan Non Blok (GNB)

1. Latar belakang berdirinya GNB

- a. Diilhami oleh KAA di Bandung, tahun 1955.
- b. Adanya krisis Kuba, yaitu Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba.
- c. Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

2. Tujuan GNB

Gerakan Non Blok bertujuan untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok Barat dan blok Timur.

3. Peranan Indonesia dalam GNB

- a. Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd.
- b. Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan KTT Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta.

Ringkas 9: Kemampuan Berbahasa Indonesia

Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar merujuk pada Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan cara interelasi antara lambang-lambang itu dalam suatu bahasa.

A. Abjad

Dalam bahasa Indonesia abjad yang digunakan terdiri dari huruf sebagai berikut.

- ♦ Ditulis dalam penulisan huruf kapital (huruf besar)
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
- ♦ Ditulis dalam penulisan huruf kecil
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

B. Pembagian Huruf

Huruf dibagi menjadi dua, yaitu

- ♦ Huruf vokal (huruf hidup)
A, I, U, E, O
- ♦ Huruf konsonan (huruf mati)
Huruf konsonan terdiri dari sisa abjad selain huruf vokal, yaitu
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z



C. Diftong

- ♦ Diftong terdiri dari:
 - ai,
 - au, dan
 - oi.
- ♦ Diftong yang dieja dengan ai, au, oi dilafalkan sebagai bunyi vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan luncuran w atau y, karena diftong bukanlah gabungan dua bunyi vokal.
- ♦ Istilah semivokal yang kadang-kadang dipakai untuk w dan y sudah menunjukkan bahwa keduanya bukan vokal.
- ♦ Cermati contoh pemakaian diftong berikut ini.

Huruf	di depan	di tengah	di belakang
ai	-	-	pantai damai
au	<u>au</u> s <u>au</u> la	<u>sa</u> udara <u>sa</u> udagar	beliau kemar <u>au</u>
oi	-	-	ambo <u>i</u>

- ♦ Bandingkanlah beda lafal au dan ai dalam:
 - “kemarau” dan “menggulai”, au dan ai pada kata tersebut berfungsi sebagai diftong.
 - “mau” dan “menggulai teh”, au dan ai pada kata tersebut melambangkan deret dua bunyi vokal.

D. Persukuan

Dalam bahasa Indonesia setiap suku kata ditandai oleh sebuah Vokal (disingkat V). Vokal dapat diikuti maupun didahului oleh Konsonan (disingkat K). Pola umum suku kata, antara lain:

1. V : a-kan, a-ku, ma-u
2. VK : an-dal, la-in, in-dah
3. KV : ra-jut, ma-ju, bi-ru
4. KVK : ban-tah, lam-bat,
ram- but

E. Penulisan Huruf

1. Penulisan huruf kapital (huruf besar)

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada:

- a. Awal kalimat
Contoh:
Bus itu melaju dengan cepat.
- b. Awal petikan langsung
Petikan langsung ditandai dengan (“...”)
Contoh:
Ibu berkata, “Ayo bangun, matahari sudah tinggi.”
- c. Dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan
Ungkapan yang berhubungan dalam hal keagamaan berupa:



nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan, dan kitab suci,

Contoh:

- Allah
- Maha Kuasa
- Al-Qur'an
- Alkitab
- Islam
- Hindu
- Hanya kepada-Mu kami memohon.

d. Unsur nama orang

Contoh:

Gunawan Wibisono

e. Unsur singkatan nama orang, gelar, dan sapaan

Untuk menulis singkatan selalu diikuti oleh tanda titik

Contoh:

- Dr. Purwa Hastuti
- Ny. Martha
- Prof. Gunawan
- Lutfi, S.Pd.

f. Nama gelar kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang diikuti nama orang

Contoh:

- Haji Zulkarnaen
- Sultan Syahrir

g. Unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama

orang, nama instansi dan nama tempat

Contoh:

- Kepala Dinas Pertanian
- Presiden Joko Widodo
- Kolonel Panjaitan

Bedakan dengan penulisan berikut.

- Siapakah presiden pertama kita?
- Wakil Kepala Dinas Pertanian Samanhudi naik jabatan menjadi kepala dinas pertanian.

h. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa

Contoh:

- bahasa Jawa
- suku Baduy
- bangsa Indonesia

Bedakan dengan penulisan berikut.

mengindonesiakan kata-kata asing

i. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah

Contoh:

- hari Senin
- bulan Juli
- tahun Hijriah
- hari Natal
- Proklamasi
- Perang Dunia I





J. Nama geografi

Contoh:

- Jalan Wisnu
- Selat Sunda

k. Unsur nama negara, lambang pemerintahan, serta nama dokumen resmi

Contoh:

- Pengadilan Tinggi
- Kementerian Hukum dan HAM
- Piagam Jakarta

l. Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang dipakai sebagai nama badan, lembaga pemerintah, serta nama dokumen resmi

Contoh:

Undang-Undang Dasar 1945

m. Semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata tugas

Kata tugas adalah kata partikel seperti: di, ke, dari, untuk, dan yang.

Kata tugas tidak terletak pada posisi awal kalimat.

Contoh:

Pendidikan Karakter
karangan Gunawan
Wibisono

n. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan dan pengacuan
Kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti: bapak, ibu, adik, saudara, kakak, dan paman.

Contoh:

- Kapan Paman datang?
- Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Bedakan dengan penulisan berikut ini.

Kita wajib menghormati
bapak dan ibu kita.

2. Penulisan huruf miring

Huruf miring dipakai pada:

a. Penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan

Contoh:

Majalah *Cakrawala* selalu memuat berita terbaru.

b. Penegasan atau pengkhususan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata

Contoh:

Jalan ini adalah *saksi* pertempuran arek-arek Surabaya.

c. Penulisan kata nama ilmiah atau untkapan asing yang belum



disesuaikan ejaannya.

Contoh:

- *Oriza Satifa*
- Rapat kali ini dilaksanakan di *youth centre*.

F. Penulisan Kata

1. Kata dasar

Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan.

Contoh:

Ibu pergi ke pasar.

2. Kata turunan

a. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya.

Contoh:

- dibeli
- membersihkan
- bergulat

b. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya.

Contoh:

- bertanggung jawab
- mata pelajaran
- persegi panjang

c. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata dengan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, unsur gabungan itu

harus ditulis serangkai.

Contoh:

- mempertanggungjawabkan
 - melipatgandakan
- d. Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu harus ditulis serangkai.

Contoh:

- Swalayan
- Pancasila
- Dwidharma

Catatan:

1) Jika bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital di antara kedua unsur ditulis tanda hubung (-).

Contoh:

non-Islam

2) Kata “maha” sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai.

Contoh:

Pimpinan merupakan orang yang mahabijaksana di kantor ini.

3) Bentuk terikat “maha” ditulis terpisah jika diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar.





Contoh:

- Maha Esa
- Maha Pengasih

3. Kata ulang

Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung.

Contoh:

mata-mata

4. Gabungan kata

Gabungan kata yang biasa disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Bagian-bagiannya yang umum ditulis terpisah.

- a. Gabungan kata yang belum mendapat afiks (imbuhan) ditulis terpisah.

Contoh:

- papan tulis
- perdana menteri

- b. Gabungan kata yang mendapat prefiks (awalan) atau sufiks (akhiran) ditulis terpisah dan awalnya dirangkaikan kata pertama, sedangkan akhirnya dirangkaikan dengan kata kedua.

Contoh:

pertanggungjawaban

- c. Gabungan kata yang mungkin dapat menimbulkan salah arti dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung

untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan.

Contoh:

suami-istri

- d. Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena sudah dianggap sebagai satu kata.

acapkali, adakalanya,

bilamana, bismillah,

bumiputra, kilometer,

daripada, dukacita,

halalbihalal, hulubalang,

kacamata, kasatmata,

keretabahasa, manakala,

manasuka, matahari,

olahraga, peribahasa,

puspawarna, radioaktif,

saputangan, sediakala,

segitiga, sukacita, sukarela,

syahbandar, titimangsa.

5. Kata depan

Kata depan *di, ke, dari* ditulis terpisah dari kata yang mengikuti, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti *kepada* dan *daripada*.

Contoh:

- di sungai
- ke Jakarta
- dari Mekkah

6. Kata ganti/klitik *ku, kau, mu, dan nya*

Klitik *ku, kau, mu, dan nya* ditulis





serangkai.

Contoh:

di hadapannya

7. Kata sandang *si* dan *sang*

Kata sandang *si* dan *sang* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

Contoh:

- sang kancil
- si manis

8. Partikel

a. Partikel *lah*, *kah*, dan *tah* ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.

Contoh:

Apakah ayahmu baik-baik saja?

b. Partikel *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya

Contoh:

apa pun

Catatan:

Berikut adalah kelompok kata yang sudah dianggap padu ditulis serangkai.

adapun, andaiapun,
ataupun, bagaimanapun,
biarpun, kalaupun,
kendatipun, maupun,
meskipun, sekalipun,
sungguhpun, walaupun.

c. Partikel *per* ditulis terpisah jika berarti mulai, demi, dan setiap.

Contoh:

- Harga bensin saat ini naik per liternya.
- Harga bensin naik per 1 Januari 2016.

Bedakan dengan penulisan berikut.

Satu demi satu pergi
meninggalkan induknya.

G. Penulisan Angka dan Lambang Bilangan

Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Angka yang lazim digunakan dalam tulisan adalah:

- ♦ Angka Arab
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- ♦ Angka Romawi
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
L (50),
C (100),
D (500),
M (1.000)

Ketentuan penulisan angka dan lambang bilangan sebagai berikut.

1. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, isi, satuan waktu, dan nilai uang.

Contoh:

- 10 liter

• sepuluh



2. Angka digunakan untuk menandai nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat.
Contoh:
Jalan Wisnu No. 3
3. Angka digunakan untuk menomorikan karangan atau bagiannya.
Contoh:
Bab III
Pasal 28 ayat 1
4. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut.
 - a. Bilangan utuh
Contoh:
317 ditulis tiga ratus tujuh belas
 - b. Bilangan pecahan
Contoh:
 $\frac{1}{2}$ ditulis setengah
5. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut.
Contoh:
 - Bab I
 - Bab ke-1
 - Bab pertama
6. Penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran (-an) mengikuti cara berikut.
Contoh:
 - tahun 90-an
 - tahun sembilan puluhan
7. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf.
Contoh:
Kakak ke kamar kecil sampai tujuh kali.
8. Jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan, maka ditulis angka.
Contoh:
Alat tulis yang dibeli berjumlah 2 buku tulis, 4 pensil, dan 3 penghapus.
9. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.
Contoh:
Dua puluh siswa telah menyelesaikan ujian dengan baik.
10. Angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca.
Contoh:
Rumah baru itu dibangun dengan biaya sebesar 450 juta rupiah.
11. Jika dalam dokumen resmi, seperti berita acara, akta dan kuitansi, maka bilangan ditulis dalam bentuk angka dan huruf sekaligus.





Contoh:

Telah diterima dari benda-
hara, uang sejumlah
Rp15.000,00 (lima belas ribu
rupiah).

Catatan:

Jika bilangan dilambangkan
dengan angka dan huruf maka
penulisannya harus tepat.

12. Jika dalam teks (dokumen biasa)
maka bilangan ditulis dalam
bentuk angka sesuai dengan
ketentuan penulisan.

Contoh:

Siswa di kelas kami ada 37
anak.

H. Pemakaian Tanda Baca

1. Tanda titik (.)

Tanda titik digunakan pada:

- a. Akhir kalimat yang bukan
pernyataan seruan.

Contoh:

Ibu pergi ke pasar.

- b. Akhir singkatan nama orang.

Contoh:

M. Lufti Ade

- c. Akhir singkatan gelar, jabatan,
pangkat, dan sapaan.

Contoh:

Elisa, S.E.

- d. Akhir singkatan kata atau
ungkapan yang sudah sangat
umum.

Contoh:

dan sebagainya disingkat
menjadi dsb.

Catatan:

- ♦ Tanda titik tidak dipakai
dalam singkatan yang
terdiri dari huruf-huruf
awal kata atau suku kata,
atau gabungan keduanya,
atau yang terdapat di
dalam akronim yang sudah
diterima oleh masyarakat.

Misal: Sekjen

- ♦ Tanda titik tidak dipakai
dalam singkatan lambang
kimia, satuan ukuran,
takaran, timbangan, dan
mata uang.

- e. Akhir angka atau huruf dalam
suatu bagan, ikhtisar, atau
daftar.

Contoh:

1.1. Tes Penalaran Verbal

1.1.1. Sinonim

1.1.2. Antonim

1.1.3. Analogi

- f. Untuk memisahkan angka, jam,
menit, dan detik yang me-
nununjukkan waktu atau jangka
waktu.





Contoh:

pukul 15.03.10

- g. Untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang menyatakan jumlah.

Contoh:

Buku yang baru saja dibeli berisikan 1.350 lembar.

Catatan:

Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah, seperti tahun dan nomor telepon.

- h. Antara nama penulis, judul karangan yang tidak berakhir dengan tanda tanya, tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka.

Contoh:

Wibisono, Gunawan. 2016.
Pendidikan Karakter.
Jakarta: Pelita.

Catatan:

Tanda baca titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, di belakang alat pengirim, dan tanggal surat atau penerima surat.

2. Tanda koma (,)

Tanda koma digunakan pada:

- a. Antara unsur-unsur suatu perinci atau pembilangan.

Contoh:

Latika membawa tas, tempat minum, dan payung.

- b. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan.

Contoh:

Saya tidak pernah menyesal sekolah di desa, tetapi saya ingin merasakan gemerlapnya kota.

- c. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya: oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu.

Contoh:

Lagi pula, tidak ada model sepatu yang cocok untuk dikenakannya.

- d. Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya.

Contoh:



Jika jalan macet, saya
terlambat sampai kantor.

Jika jalan macet

= Anak kalimat

saya terlambat sampai

kantor = induk kalimat

Catatan:

Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimatnya.

- e. Untuk memisahkan kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, dan kasihan dari kata yang lain.

Contoh:

Wah, mewah sekali!

- f. Untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam penulisan daftar pustaka.

Contoh:

Wibisono, Gunawan. 2016.

Pendidikan Karakter.

Jakarta: Pelita.

- g. Di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya, untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga.

Contoh:

Lukito Edi, S.S.

- h. Digunakan di depan angka persepuluhan dan di antara rupiah dan sen dalam bilangan.

Contoh:

35,20 cm

- i. Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.

Contoh:

Kata Lisa, “Ayo berangkat!”

Catatan:

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan mendahului bagian lain dalam kalimat itu.

- j. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi.

Contoh:

Guru Geografi, Pak

Lukito, termasuk

populer di sekolah ini.

- k. Di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

Contoh:

Yogyakarta, 1 Januari 2016.



3. Tanda titik dua (:)

Tanda titik dua digunakan pada:

- a. Akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau perincian.

Contoh:

Bahan roti bolu kukus seperti: tepung terigu, mentega, dan telur.

Catatan:

Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perincian merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.

- b. Digunakan sesudah ungkapan atau kata yang memerlukan pemerian.

Contoh:

Ketua : Rajiman
Wakil : Widodo

- c. Digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.

Contoh:

Galuh : “Wen, maafkan aku.”
Wenda : “Pergi dari sini!”

- d. Di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan.

Surat Al-Baqarah : 24

4. Tanda tanya (?)

Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya.

Contoh:

Kapan nikah?

5. Tanda seru (!)

Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat.

Contoh:

Semangat!

6. Tanda hubung (-)

Tanda hubung digunakan pada:

- a. Untuk menyambung unsur-unsur kata ulang.

Contoh:

undang-undang

- b. Untuk menyambung huruf kata yang dieja satu per satu dan bagian-bagian tanggal.

Contoh:

i-l-u-s-i

29-07-1994

- c. Untuk merangkaikan (se-) dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital.

Contoh:

se-Indonesia





- d. Untuk merangkaikan (ke-) dengan angka.

Contoh:

putra ke-2

- e. Untuk merangkaikan angka dengan akhiran (-an).

Contoh:

gaya 90-an

- f. Untuk merangkaikan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata.

Contoh:

SIM-nya

- g. Menyambung awalan dengan bagian kata belakangnya, atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris.

Contoh:

... pesawat jet pribadi itu mendarat di landasan.

- h. Digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing.

Contoh:

di-charge

I. Kata

1. Kata berimbuhan

Proses yang terjadi karena bentuk dasar ditambahkan imbuhan.

Contoh:

ber + satu = bersatu

2. Kata ulang disebut juga dengan reduplikasi.

Contoh:

sayur-mayur

undang-undang

3. Kata majemuk

Proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga menimbulkan makna baru.

Contoh:

sepatu sandal

J. Tata Kalimat

1. Frasa

Frasa atau kelompok kata adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan, tetapi tidak membentuk subjek-predikat dan tidak membentuk makna baru.

Menurut tipe strukturnya, frasa dapat dibagi menjadi:

a. Frasa endosentris

- 1) Subordinatif

Frasa yang salah satu unsurnya sebagai inti dan unsur lainnya sebagai keterangan.

Contoh:

- tas baru

D M

- sehelai rambut

M D



Keterangan:

D : *diterangkan (inti)*

M : *menerangkan (penjelas)*

2) Koordinatif

Frasa yang semua unsurnya dapat berlaku sebagai inti.

Contoh:

suami istri

3) Apositif

Frasa yang salah satu unsurnya sebagai keterangan, tetapi keterangan itu menggantikan kedudukan yang diterangkan.

Contoh:

Lina, gadis yang berambut lurus.

Frasa *gadis yang berambut lurus*

berfungsi menjelaskan Lina.

b. Frasa eksosentris

1) Efektif

Contoh: di pasar

2) Objektif

Contoh:

menggenggam tangannya

3) Predikatif

Contoh:

kami membawa

4) Konjungtif

Contoh: jika mereka

2. Klausa

Klausa adalah suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional yang menurut tata bahasa tradisional dikenal sebagai subjek dan predikat. Klausa terdiri dari:

a. Klausa utama (induk kalimat)

Klausa yang dapat berdiri sebagai kalimat.

b. Klausa bawahan (anak kalimat)

Klausa yang tidak dapat berdiri sebagai kalimat. Biasanya, anak kalimat diawali dengan konjungsi.

Contoh:

Kami mengunjungi nenek tua itu ketika suaminya masih sehat.

Kami mengunjungi nenek tua itu
= *Induk kalimat*

ketika suaminya masih sehat
= *anak kalimat*

3. Kalimat

Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan.

a. Kalimat majemuk setara

Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa yang hubungannya setara.



Contoh:

Guru menerangkan
materi belajar dan siswa
mendengarkannya.

Guru menerangkan materi
belajar

= *klausa utama*

siswa mendengarkannya

= *klausa utama*

- b. Kalimat majemuk bertingkat
Kalimat majemuk bertingkat
adalah kalimat tunggal yang
diperluas dan perluasan itu
berbentuk klausa baru.

Contoh:

Kami belajar dengan giat
agar lulus tes CPNS tahun
ini.

Kami belajar dengan giat

= *Induk kalimat*

agar lulus tes CPNS tahun ini

= *anak kalimat*

K. Tata Makna

1. Macam-macam makna

- a. Berdasarkan makna tambahan
- 1) Makna denotatif (makna sebenarnya)
Contoh:
Gulai kepala kambing.
 - 2) Makna konotatif (kiasan)
Contoh:
keras kepala

- b. Berdasarkan hubungan makna
antara satu kata dengan kata
lain

- 1) Sinonim

Contoh:

nakal = badung

- 2) Antonim

Contoh:

tinggi >< rendah

- 3) Homonim

Berdasarkan tingkatannya,
homonim terbagi menjadi:

- a) Homograf

Ejaan sama, tetapi lafal
dan makna berbeda.

Contoh:

Apel (buah) dan apel
(upacara).

- b) Homofon

Lafal sama, tetapi
ejaan dan makna
berbeda.

Contoh:

Massa dan masa.

- c) Hiponim

Makna kata mewakili
makna dari kata yang
lebih umum.

Contoh:

Kata umum : bunga
Hiponim : mawar,
melati, dan kamboja



d) Polisemi (makna ganda)

Contoh:

Kepala dalam arti
pemimpin.

Kepala dalam arti
bagian tubuh paling
atas.

2. Perpindahan makna kata

a. Majas

1) Perumpamaan (simile)

Contoh:

Kehidupan pernikahan
ibarat menulis di lembar
baru.

2) Personifikasi

Contoh:

senja merona

3) Metonimia

Contoh:

Mereka pergi dengan
menggunakan Kijang.
*Kijang yang dimaksud di atas
adalah merek mobil.*

4) Sinekdot

a) Pars pro toto (sebagian
untuk keseluruhan)

Contoh:

Sejak seminggu
yang lalu, saya tidak
melihat batang
hidungnya.

b) Totem pro parte
(keseluruhan untuk
sebagian)

Contoh:

Indonesia menjadi
juara umum pada
ajang bergengsi itu.

b. Istilah

Istilah adalah kata atau gabungan
kata yang secara cermat meng-
ungkapkan suatu konsep, proses,
keadaan atau sifat yang khas dalam
bidang tertentu.

Contoh:

rekam medis (istilah kedokteran)

Ringkasan Pemas

gk 10: ahaman Bacaan

Kemampuan bahasa, daya ingat,
kemampuan konsentrasi, ketelitian, dan
menyelesaikan masalah mendukung
kemampuan pemahaman bacaan.
Berikut adalah materi seputar bacaan.

A. Gagasan Utama Bacaan

Gagasan utama/gagasan pokok/ide
pokok merupakan gagasan atau ide
yang menjadi pokok pengembang
bacaan. Cara menemukannya ada-
lah sebagai berikut:

1. membaca secara cermat;
2. memahami maksud pembi-
caraan atau hal pokok yang
dibicarakan dalam bacaan;





- menemukan ide pokok tiap paragraf kemudian digabungkan dan dirangkum sehingga didapatkan kesimpulan hal pokok yang dibicarakan dalam bacaan tersebut.

B. Paragraf

Paragraf adalah seperangkat kalimat yang berhubungan dan membentuk satu gagasan. Biasanya dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang padu, dan kalimat pertama dalam suatu paragraf ditulis dengan cara agak menjorok ke dalam.

Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama.

- Paragraf deduktif**
Gagasan utama terletak pada awal paragraf.
- Paragraf induktif**
Gagasan utama terletak pada akhir paragraf.
- Paragraf campuran**
Gagasan utama terletak pada awal dan akhir paragraf.

C. Gagasan Utama Paragraf

Gagasan utama/gagasan pokok/ide pokok merupakan gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang paragraf sehingga dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan utama.

D. Kalimat Utama

Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf. Dalam satu paragraf, terdapat gagasan pokok atau utama yang berada pada kalimat utama. Kalimat utama dikembangkan oleh kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama sering disebut kalimat topik sehingga perlu dijelaskan dengan kalimat-kalimat selanjutnya dalam paragraf tersebut yang disebut sebagai kalimat penjelas.

Ciri kalimat utama:

- Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut.
- Berupa kalimat lengkap dan dapat berdiri sendiri.
- Mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain.
- Pada paragraf induktif, kalimat utama sering kali ditandai dengan kata-kata seperti: “Sebagai kesimpulan ...”, “Yang penting ...”, “Jadi, ...”, “Dengan demikian ...”

E. Kalimat Penjelas

Kalimat penjelas, yaitu kalimat yang





atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama.

Ciri-ciri kalimat penjelas:

1. merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri;
2. arti kalimatnya akan lebih jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf;
3. pembentukannya memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau kalimat transisi;
4. berisi rincian, keterangan, contoh dan data yang mendukung kalimat utama.

TIPS:

Berikut adalah tips untuk meningkatkan pemahaman bacaan.

1. Perbanyak membaca
Melatih diri dengan banyak membaca menjadikan Anda gemar membaca sehingga Anda akan terlatih dengan bacaan-bacaan panjang dan tidak cepat lelah saat membaca.
Jangan khawatir bagi Anda yang tidak terlalu senang membaca, ada tips untuk Anda, yaitu awali dengan membaca bacaan pendek, misalnya berita di koran, artikel majalah kesayangan Anda, artikel di internet yang menarik minat Anda untuk membaca.

2. Latihan membaca cepat
Waktu yang disediakan dalam tes sangat terbatas sehingga apabila Anda menerapkan kebiasaan cara baca santai seperti saat di rumah tanpa target waktu akan menjadi sangat merugikan saat tes berlangsung. Teknik membaca cepat dapat membantu Anda dalam menjawab soal dengan lebih mudah dan cepat dengan membaca langsung ke inti-intinya karena pada umumnya soal-soal yang ditanyakan dalam tes terdapat di inti bacaan.
3. Ambil intinya
Saat membaca, bagian yang paling penting Anda baca adalah di awal bacaan (paragraf 1) karena di situlah letak gagasan utama/gagasan pokok/ide pokok bacaan. Lanjutkan dengan membaca awal atau akhir setiap paragraf karena biasanya di situ merupakan letak kalimat utama paragraf.



Setelah mendapatkan kalimat utama paragraf, cobalah melanjutkan dengan mengambil inti dari kalimat utama paragraf tersebut karena inti dari kalimat utama merupakan gagasan utama/gagasan pokok/ide pokok paragraf. Terakhir, bacalah bagian akhir bacaan karena biasanya intisari atau kesimpulan bacaan ada di bagian tersebut.

4. Cermati fakta dan data dalam bacaan
Anda bisa menandai fakta yang terjadi dalam sebuah kejadian atau data yang terdapat di bacaan dengan menandai dengan garis bawah karena bisa jadi fakta dan data ini dapat membantu Anda dalam menjawab soal selanjutnya. Dengan berpedoman fakta dan data dalam bacaan maka Anda dapat terhindar dari opini yang mungkin Anda bentuk selama membaca.

TRIK:

Berikut adalah trik agar mempermudah Anda dalam menyelesaikan soal yang ada kaitannya dengan pemahaman bacaan.

1. Bacalah dengan cepat
Membaca dengan teknik cepat dapat membantu Anda dalam memanfaatkan waktu dengan baik, dan menemukan beberapa kata kunci yang diperlukan tanpa harus membaca terlalu detail atau tanpa membaca semua kalimat.
2. Konsentrasi
Membaca dengan konsentrasi dapat membantu Anda dalam hal mengingat kata kunci yang diperlukan, inti bacaan, mengaitkan antarkejadian dan membantu Anda dengan cukup sekali saja membaca bacaan tersebut tanpa harus mengulangnya berkali-kali.
3. Kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf
Soal bacaan sering kali menuntut Anda untuk menemukan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kalimat utama sehingga menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf menjadi sangat penting dalam hal ini.
4. Pisahkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas
Dengan memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas, maka Anda akan lebih mudah menemukan gagasan utama/gagasan pokok/ide pokok suatu paragraf.



5. Gagasan utama/gagasan po–kok/ide pokok paragraf me–lekat pada kalimat utama
Seperti halnya kalimat utama, gagasan utama/gagasan po–kok/ide pokok terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf.
6. Gagasan utama/gagasan po–kok/ide pokok bacaan ter–dapat di bagian awal bacaan dan kaitkan dengan ide pokok dari tiap paragraf.
7. Cari jawabannya di dalam bacaan
Semua jawaban dari soal bacaan terdapat di bacaan yang telah disediakan sehingga Anda dapat mencari jawabannya di dalam bacaan sesuai dengan petunjuk soal.
8. Hindari opini
Hindarilah menjawab soal bacaan menurut pendapat Anda/opini/persepsi Anda melainkan jawablah sesuai dengan apa yang sudah tertulis di bacaan sehingga di antara pilihan jawaban yang disediakan maka pilihlah yang paling sesuai dengan fakta atau data yang telah dijelaskan di bacaan. Namun apabila jawaban yang dimaksud tidak tertulis di bacaan, bisa jadi jawaban yang diinginkan oleh penulis soal merupakan kaitan antarkalimat/kejadian dalam bacaan tersebut (hasil konsekuensi logis).

